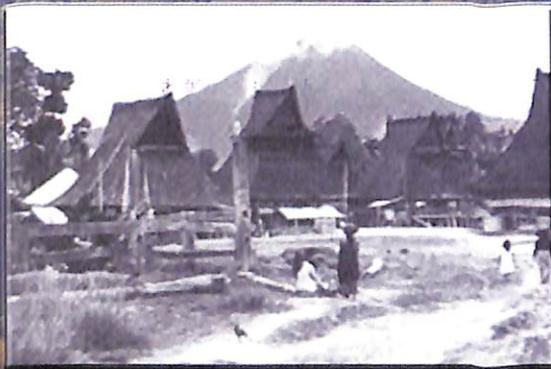


Buletin

H a b a



Kapita Selekta Sejarah Dan Budaya

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2007

45

H a b a

Informasi Kesejarahan
dan Kenilaitradisional

No. 45 Th. VII
Edisi Oktober – Desember 2007

PELINDUNG

Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film
Direktur Tradisi
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

Teuku Djuned
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Titit Lestari
Cut Zahrina
Essi Hermaliza

SEKRETARIAT

Kasubag Tata Usaha
Bendaharawan
Yulhanis
Netti Darmi
Lizar Andrian

ALAMAT REDAKSI

Jl. Tuanku. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226-24216 Fax. (0651) 23226
Email : info@bksntbandaaceh.info
Website : www.bksntbandaaceh.info

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai
Tradisional Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2 spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Bagi yang dimuat akan menerima imbalan sepiantasnya.

ISSN : 1410 – 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info Budaya

Timphan

Wacana

- Sudirman Tradisi Intelektual dan Budaya Toleran dalam Sejarah Aceh
- Irini Dewi Wanti Perang Sunggal (1872-1895) (Tinjauan Historis Terhadap Masalah Konflik Tanah di Sumatera Utara)
- Indra Afkhar Trepes (Two Rivers) : Basis Batalyon Tentara Keamanan Rakyat (TKR) B di Sumatera Timur (1945-1947)
- Deni Sutrisna Kopi: Kajian Sejarah Komoditas dan Ekonomi di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah
- Mehmet Ozay Baba Daud: Ulama Aceh Berasal Dari Turki
- Titit Lestari Harimau, Gajah, Banjir, dan Keseimbangan Alam di Aceh
- Zulkifli Lubis Revitalisasi Kearifan Budaya mandailing Untuk Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis
-
- Pustaka
- Sejarah Seni Rupa Sumatera Utara Kajian Kehidupan Seni Rupa Di Medan Tahun 1945-2005 (Sebuah Observasi Historis)
-
- Cerita
- Pancuri Tujoh
-
- Cover
- Ilustrasi Seni Tari
-
- Biografi Tokoh

Tema Haba No. 46

PENGANTAR

Redaksi

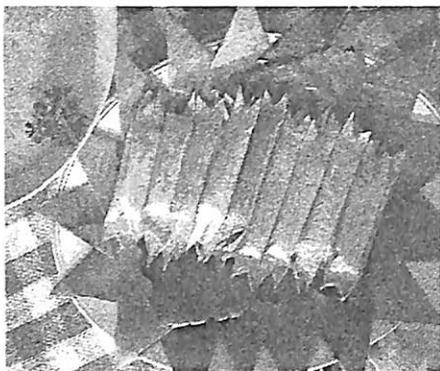
Sebagai lembaga pemerintah Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh yang memiliki wilayah tugas dua Provinsi (NAD dan Sumut) memang sangat berat untuk dapat melakukan semua penelitian yang sifatnya tematik. Hal ini mengingat selain peneliti dihadapkan pada bidang akademis juga penyesuaian urgensi (mendesak atau tidak) suatu penelitian untuk segera dilakukan. Sehingga pertahunnya dengan penuh pertimbangan ditentukan tema-tema penelitian dan masih sangat terbatas. Namun kehadiran Bulletin Haba yang megetengahkan tema dan tulisan yang beragam memperkaya kajian yang dilakukan oleh BPSNT Banda Aceh.

Salah satunya adalah dengan mengetengahkan tema bulletin Haba Edisi 45 "*Kapita Selektta Sejarah dan Budaya NAD-Sumut*" menghasilkan beragam tulisan sejarah dan budaya yang tematik. Beberapa tulisan datang dari akademisi yang ada di Sumatera Utara. Kali ini memang bulletin haba memberikan sentuhan yang berbeda karena keberagaman sejarah dan budaya terasa kental dalam wacana yang disampaikan. Tema sejarah sosial masih mendominasi namun masalah pemanasan global juga dibahas dalam sentuhan kearifan budaya disampaikan dengan mengetengahkan satu tulisan "Harimau, Gajah, Banjir, dan Keseimbangan Alam di Aceh". Kapita Selektta memang dapat dikatakan sebuah pilihan alternatif dalam menghimpun tema-tema yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian pada masa yang akan datang.

Tulisan yang beragam diharapkan memperkaya wawasan dan khasanah pemikiran pembaca setia bulletin haba. Edisi 45 adalah edisi terakhir untuk tahun 2007 diharapkan kritik dan masukan dari pembaca untuk peningkatan kualitas bulletin ini pada masa yang akan datang. Kami dari dewan redaksi mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian bulletin ini dan ucapan terima kasih kepada para penyumbang tulisan. Menuangkan hasil pemikiran dan pengetahuan dalam tulisan adalah sedekah terbesar sebagai amal zariyah kita dihari akhir kelak. "Terus berkarya", sampai bertemu pada edisi bulletin haba tahun 2008. (IDW).

Redaksi

TIMPHAN



Thimphan adalah makanan khas masyarakat suku bangsa Aceh. Bahan utama makanan ini adalah tepung ketan, tepung sagu, tepung terigu dan bahkan juga singkong. Thimphan yang terbuat dari tepung ketan dan serikaya pada umumnya disajikan pada saat acara-acara resmi atau kendhuri. Sedangkan thimphan yang terbuat dari singkong dan juga tepung sagu pada umumnya disajikan pada saat acaran sore dalam skala kecil atau untuk kudapan sore hari. Daun yang digunakan untuk membungkus timpan biasanya dipilih daun pisang yang masih muda atau masih bergulung. Daun yang digunakan biasanya berasal dari daun pisang wak (pisang monyet) ataupun pisang abu (pisang kepok)

Thimphan pulut

Makanan khas Aceh dari bahan tepung ketan, minyak goreng, telur, gula, santan, daun pisang. Makanan ini pada umumnya disajikan pada setiap acara kenduri maupun hari besar agama Islam. Makanan ini dibuat dengan cara mencampur tepung ketan dengan air dan diisi dengan sarikaya dan dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus hingga matang. Sarikaya dibuat dari campuran telur, santan, dan gula yang diaduk dan dimasak diatas api hingga mengental dan mengering. Agar sarikaya lebih nikmat maka di dalam adonan sarikaya dapat juga ditambahkan potongan nangka. Selain tepung

ketan adonan ini dapat juga dibuat dari tepung ketan hitam maupun tepung ketan putih yang dicampur dengan labu kuning. Bahkan di beberapa daerah di Aceh (Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara) digunakan tepung ketan putih yang dicampur dengan pisang untuk memberikan aroma keharuman pisang. Pisang yang biasa digunakan adalah pisang monyet. Isinya selain menggunakan sarikaya, adonan ini dapat juga diisi dengan inti kelapa.

Thimphan ubi

Thimphan ubi dengan inti di dalam dan inti dicampur. Thimphan ubi ini terbuat dari ubi / singkong yang diparut kemudian diisi dengan inti kemudian dikukus. Ada juga yang membuat timpan ini dengan cara mencampur singkong parut, gula dan kelapa. Kemudian adonan ini dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang.

Thimphan balut (sakua)

Thimphan ini terbuat dari adonan tepung terigu yang dibuat dadar kemudian dadar tersebut diisi dengan sarikaya dan digulung atau dibalut kembali.

Thimphan sage (sagu)

Thimphan ini dibuat dari tepung sagu dengan isi berupa inti (kelapa dan gula), ada juga yang mencampur langsung antara tepung sagu, gula, dan kepala, serta ada juga yang menambahkan dengan pisang kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang.

Tradisi Intelektual dan Budaya Toleran dalam Sejarah Aceh

Oleh: Sudirman

Pendahuluan

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511) dan Portugis mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka, maka jalur perdagangan Muslim dialihkan ke sepanjang pesisir barat Sumatera melalui Selat Sunda. Pengalihan jalur perdagangan Muslim itu menjadikan letak ibukota kerajaan Aceh, Banda Aceh, menjadi sangat strategis dan dalam waktu singkat berkembang menjadi pusat perdagangan muslim yang penting. Pedagang muslim dari berbagai wilayah Nusantara dan luar Nusantara datang untuk berdagang ke Aceh, sehingga Aceh menjadi daerah yang kosmopolitan dan terbuka bagi dunia luar.

Kegiatan keagamaan dan pengetahuan menjadi berkembang pesat. Sastra Melayu juga ikut pindah ke Aceh dan menjadi pusat perkembangannya yang ketiga setelah Pasai dan Malaka. Kegiatan penulisan/ persuratan dalam bahasa Melayu mencakup bidang pengetahuan yang luas, meliputi : sastra, tasawuf, agama, sejarah, ilmu falak, ilmu pengobatan, undang-undang, rajah, takbir mimpi, dsb. Kitab-kitab pendidikan agama dalam berbagai tingkat ditulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Jawi, di Aceh disebut "Kitab Jawoe", di Jawa dikenal dengan nama "Kitab Kuning", sehingga Aceh menjadi pusat studi ilmu pengetahuan di Asia Tenggara pada waktu itu.

Bandar Aceh menjadi kosmopolitan yang sibuk, tempat transit terpenting bagi jaamah haji Nusantara. Ulama-ulama Timur Tengah, Gujarat, datang dan pergi silih berganti memperkenalkan aliran-aliran tarekat, tasawuf, ilmu manthik, dll.¹ Oleh

karena itu, perlu kiranya diungkapkan kembali tentang tradisi intelektual dan budaya toleran tersebut untuk dapat menjadi inspirasi masa kini dan akan datang.

Tradisi Intelektual

Aceh tidak hanya pernah berkembang budaya belajar dan intelektual yang terkenal, tetapi juga sebagai pusat penyebaran pertama agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Sebagai sebuah pusat penyebaran Islam, Aceh dituntut secara alami untuk memenuhi kebutuhan intelektual ke Islam. Di Kerajaan Pasai tradisi intelektual ketika itu sungguh didukung oleh pusat kekuasaan. Ibn Battutah ketika itu menemukan dua ulama Persia di Pasai, yaitu Qadhi Syarif Amir Sayyid dari Syiraz dan Taj al-Din dari Isfahan. Diskusi keagamaan dilaksanakan secara reguler di istana dan mesjid yang Sultan juga berperanserta aktif.² Di sini terlihat betapa penguasa Pasai ketika itu memperlihatkan antusiasme yang tinggi terhadap bidang pendidikan dan pengkajian Islam. Budaya ilmiah dan tradisi intelektual yang berkembang di Pasai terus berlanjut pada abad ke-15. Oleh karenanya, meskipun Melaka telah muncul sebagai sebuah kesultanan pada abad ke-14 dan 15, posisi Pasai sebagai ranah pengkajian Islam sangat penting, Melaka masih memiliki respek yang tinggi terhadap Pasai sebagai pusat kajian ke-Islaman di kawasan ini, dan ia tetap menjadikan Pasai sebagai tempat rujukan bagi diskursus ke-Islaman.³

Budaya dan tradisi intelektual inilah yang kemudian dilanjutkan oleh kerajaan

² Ibn Battutah, *Rihlah*, vol. 4, 230-231.

³ Buyong bin Adil, *The history of Malacca during the Period of the Malay Sultanate* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1974), 36.

Aceh Darussalam. Abad ke-16 memperlihatkan kemajuan intelektualitas yang tinggi di Aceh, ini dibuktikan dengan kedatangan beberapa ulama untuk misi pendidikan. Mereka menetap dan mengajar di Aceh. Pada masa Pemerintahan Sultan Husayn (berkuasa 1571-1579), seorang ulama Mekah, Muhammad Azhari, datang dan mengajar di Aceh. Berikutnya, pada masa pemerintahan Sultan 'Ala' al-Din (1579-1596), tradisi kedatangan ulama juga terus berlanjut dan bahkan menunjukkan peningkatan. Seorang ulama Mekah yang lain, bernama Syaikh Abu al-Khayr bin Syaikh Ibn Hajr, datang ke Aceh untuk mengajar berbagai kajian ke-Islaman, termasuk tasawwuf dan Fiqh. Syaikh Muhammad Yarnani, dari Yaman, juga datang ke Aceh dengan mengajarkan ilmu ushul al-fiqh. Al-Raniry juga datang dan berkarir di Aceh. Ia adalah Syaikh Muhammad Jaylani bin Hasan bin Muhammad, yang mengajar sastra Arab, logika, fiqh, ushul al-fiqh, dan bahkan tasawwuf.⁴

Pada abad ke-17, tradisi kedatangan ulama luar ke Aceh tidak terjadi lagi secara besar-besaran. Di antara alasannya adalah telah munculnya beberapa ulama tempatan, yang tidak hanya berkarir dalam bidang keilmuan, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik, ini tidak berarti bahwa budaya dan tradisi ilmiah di kerajaan Aceh berkurang, bahkan, pada kurun ini intensitas diskursus ke-Islaman di kerajaan ini mencapai puncaknya, paling tidak dari perspektif Asia Tenggara.

Dalam kajian mengenai mata rantai diskursus ke-Islaman di Aceh ketika itu patut disebut Hamzah Fansuri. Pemikir, Sastrawan, dan penganut paham Wujudiyah ini merupakan simbol dari kelanjutan budaya dan tradisi intelektual ke-Islaman di kerajaan Aceh ketika itu. Perannya di kerajaan tidak hanya terlihat dalam bidang intelektual,

⁴ Nuruddin Al Raniri, *Bustanu s-salatin*, ed. T. Iskandar (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1966, hlm. 32-34.

keagamaan, akan tetapi juga dalam bidang politik dan ekonomi. Kenyataan bahwa ajaran Wujudiyah yang ia kembangkan sangat populer ketika itu menunjukkan bahwa diskursus keagamaan sangat penting. John Davis mengaksikan bahwa "masayarakat Aceh adalah Muslim. Mereka mendidik anak-anak mereka, dan memiliki lembaga pendidikan (sekolah yang banyak ;"⁵ Aliran keagamaan ini kelihatannya mendapat dukungan dari pusat kekuasaan. Kedekatan tokoh ini dengan para penguasa dibuktikan tidak hanya oleh perannya dalam bidang ekonomi dan politik, akan tetapi juga dalam bidang intelektual.⁶

Tradisi intelektual juga terus berlanjut dan berkembang pada masa Iskandar Muda (berkuasa 1607-1636). Tokoh agama dan intelektual yang paling berpengaruh ketika itu adalah Syams al-Din al-Sumatrani. Seperti Hamzah, Syams al-Din adalah juga penganut dan tokoh ajaran wujudiyah. Hubungan intelektualnya dengan Hamzah Fansuri diakui oleh parasarjana, dimana ia dikatakan berguru pada Hamzah Fansuri, atau—paling tidak—memiliki hubungan intelektual dengannya. Kapasitas intelektualnya telah membawa A.H. Johns untuk menulis bahwa Syams al-Din adalah Putra Melayu pertama yang telah mewariskan banyak karya dalam bahasa Arab dan sejumlah karya yang berbentuk prosa dalam bahasa melayu. Bahkan Iskandar Muda sendiri merupakan Murid dari Syams al-Din.⁷

Budaya dan tradisi intelektual kerajaan terus berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya. Para ulama senantiasa menduduki posisi sentra di kerajaan, seperti yang ditunjukkan oleh Nuruddin al-Raniri dan Abdurrauf al-

⁵ John Davis, *The Voyages and Works of John Davis, the Navigator*, ed. A. H. Markham (London: The Hakluyt Society, 1880), 151.

⁶ Amirul Hadi, "Exploring the Life of Hamzah Fansuri: A Historical Study," *al-Jami'ah* 41,2 (2003), 277-306.

⁷ A.H. Johns, "Shams al-Din al-Samatrani," El 2.

Singkili. Diskursus keagamaan juga mengambil tempat di istana. Di antara yang terpenting dari diskursus ini adalah debat teologis yang terjadi pada masa pemerintahan Safiyatuddin. (1641-1675) antara al-Raniri melawan Sayf al-Rijal, murid Syamsuddin. Perdebatan ini akhirnya dimenangkan oleh Sayf al-Rijal, yang bermakna bahwa dukungan istana kepada al-Raniri berakhir⁸

Dukungan penguasa terhadap budaya dan tradisi intelektual terus berlanjut. Diskursus intelektual keagamaan yang berkenaan dengan *iman* dan *kufir*, khususnya ketika al-Raniri masih berada di Aceh, kelihatannya telah memicu minat para penguasa untuk lebih banyak lagi mempelajari Islam. Hal ini diwujudkan dengan melakukan diskusi keagamaan di istana, dan -- yang juga tidak kalah penting adalah-permintaan para penguasa agar para ulama menulis buku-buku tertentu. Iskandar Thani, umpamanya, telah meminta al-Raniri untuk menulis kitab *Bustan al-Salatin dan Asnar al-Insan fi Ma 'arifat al-Ruh wa al-Rahman*. Safiyatuddin juga dikatakan bertanggung jawab atas perintah penyusunan sebuah karya mengenai perbandingan agama, yang berjudul *Tibya fi Ma 'rifat al-Adyan*.⁹ Safiyatuddin juga dikatakan telah meminta al-Singkili untuk menulis kitab yang berjudul *Mir 'at al-Thullab*.¹⁰ Karyanya yang lain, yaitu mengenai hadist yang diberi judul *Arbain*, juga dikatakan ditulis atas perintah penguasa ketika itu, yaitu Zakiyyat al-Din (berkuasa 1678-1688).

Kegiatan intelektual para ulama ketika itu tidak hanya terbatas pada diskursus ke-Islaman yang mengambil tempat di istana dan penulisan karya-karya

⁸ Tekeshi Ito, "Why Did Nuruddin ar-Raniry Leave Aceh in 1054 A.H.?", *BKI* 134 (1978), hlm. 489-491.

⁹ Syed Muhammad Naguib al-Attas, *A Commentary on the Hujjat al-Siddiq of Nur al-Din al-Raniri* (Kuala Lumpur: Ministry of Cukure, 1986), 25-27.

¹⁰ P. Voorhoeve, *Bayan Tajalli: Bahan-Bahan Untuk Mengadakan Penyelidikan Lebih Mendalam Tentang Abdurrauf Singkel. Terj. Aboe Bakar* (Banda Aceh: PDIA, 1980), 40.

keagamaan, akan tetapi juga keterlibatan mereka di dalam lembaga pendidikan. Meskipun kita tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai jenis lembaga pendidikan yang terdapat ketika itu, tidak dapat dinafikan lembaga-lembaga tersebut ada sebagaimana yang disebutkan oleh Davis dan telah menghasilkan banyak alumni.

Di muka telah disinggung bahwa terdapat kemungkinan bahwa Syams al-Din al-Sumatrani adalah murid Hamzah Fansuri, Al-Raniri juga dikatakan mempunyai beberapa orang murid.¹¹ Al-Singkili juga mempunyai sejumlah murid, di antaranya adalah Burhanuddin, atau yang lebih dikenal dengan Tuanku Ulahan dari Minangkabau ; Abd al-Muhyi dari Jawa Barat, dan Abd al-Mal bin Abd Allah dari Trengganu. Di antara muridnya yang berasal dari Aceh adalah Dawud al-Jawi al-Fansuri bin Ismail bin Agha Mushtafa bin Agha Ali al-Rumi, yang bersama-sama dikatakan telah mendirikan sebuah dayah di Banda Aceh¹².

Budaya Toleran

Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan maritim. Di kawasan mana "islam" dan "dagang" berjalan secara beriringan. Kejelian penguasanya dalam menarik perhatian para pedagang-baik regional maupaun Internasional-untuk singgah di pelabuhannya merupakan suatu hal yang fundamental, inilah di antara faktor penentu yang membuahkan hasil gemilang di Aceh pada abad ke-16, yang dikenal sebagai abad kebangkitan Aceh Darussalam. Masa keemasan Aceh Abad ke-17 sesungguhnya adalah hasil kerja para penguasanya pada masa sebelumnya, yaitu abad ke-16.

Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 merupakan momentum penting bagi kebangkitan Aceh sebagai sebuah kerajaan yang baru saja

¹¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dengan Kepulauan Nusantara XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1994), 177-178, 184-185.

¹² *Ibid.*, hlm. 209-211.

berdiri. Portugis dianggap oleh masyarakat Nusantara—khususnya Muslim—sebagai musuh "agama" dan "dagang", oleh karena itu, bangsa Portugis dianggap sebagai musuh bersama. Mulai saat itulah Aceh, yang telah menunjukkan kemampuan militer, politik, dan ekonomi yang tangguh, menjadi tumpuan harapan para pedagang Muslim dan non-Muslim.

Berkembangnya Aceh sebagai kawasan pelabuhan regional dan internasional menjadi Banda Aceh sebagai sebuah kota yang kosmopolitan yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia, baik Muslim maupun bukan. Para pedagang Muslim umumnya berasal dari Arab, Turki, Persia, Abyssinia, Pegu, dan India.¹³ Utusan pedagang dari kawasan lain juga berdatangan, seperti Cina, Belanda, Inggris, dan Perancis.¹⁴ Mereka datang ke Aceh untuk melakukan perdagangan dan biasanya menetap untuk beberapa lama. Seorang warga perancis yang mengunjungi Aceh (tahun 1601-1603) mengatakan bahwa biasanya para pedagang tinggal di Aceh sampai enam bulan.¹⁵ Orang-orang Eropa tidak hanya mendirikan kantor perdagangan di Aceh, akan tetapi juga tinggal di sana untuk beberapa lama. Bahkan Thomas Best, umpamanya, pernah memiliki sebuah rumah di Banda Aceh pada tahun 1688, dia pernah menjamu teman senegarannya, William Dampier. William Soames juga tinggal di Aceh, dari tahun 1696 sampai dengan 1697.

Sifat kota Banda Aceh yang kosmopolit berakibat pada terbukanya Aceh terhadap pengaruh luar. Aceh telah menjadi kawasan "majemuk" dan "terbuka". Penduduk terdiri atas berbagai etnis dan bangsa, dan juga tentunya dari dimensi budaya (akulturasi). Disinilah kita cermati adanya kebijakan yang brilian dari penguasan

¹³ B. Schrieke, *Indonesia Sociological Studies*. pt. 1 (The Hague : W. Van Hoeve, 1966), hlm. 41.

¹⁴ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Iskandar Muda (1607-1636)*, terj. Winarsih Arifin (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 150-170.

¹⁵ Denys Lombard, "Martin de Vitre. Premkr Bretona Aceh (1601-1603)," *Archipel* 54 (1997), hlm. 8.

Aceh ketika itu. Dengan sikap keterbukaan, Aceh mengadopsi apa yang mereka anggap penting dan sesuai dengan kepercayaan dan tradisi mereka.

Di antara yang terpenting dari kebijakan tersebut adalah pengodopsian bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan, bukan bahasa Aceh. Kebijakan ini bahkan meluas kepada dimensi "budaya" Melayu secara lebih luas. Namun, tidak berarti bahwa kerajaan ini tidak memiliki peran dalam prosesnya. Inilah yang disebut oleh Leonard Andaya sebagai "model masyarakat melayu Aceh abad ke-17".

Mengapa para ulama ini berusaha menulis kitab-kitab mereka dalam bahasa Melayu? Tidak ilain karena bahasa Melayu merupakan *lingua franca*, bahasa pengantar dalam pergaulan masyarakat nusantara, dan sekaligus juga menjadi bahasa dakwah dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Dengan menulis kitab dalam bahasa Melayu-Jawi akan lebih luas lapisan pembacanya daripada ditulis dalam bahasa Arab yang lapisan pembacanya pasti lebih terbatas. Di pesantren-pesantren (*dayah*) di Aceh kitab dalam bahasa Melayu-Jawi ini juga dipelajari. Hal ini membuka kemudahan bagi orang luar Aceh yang ingin memperdalam ilmu agamanya dan berguru di sana. Media bahasa ini telah mempermudah pergaulan dan mempererat persahabatan antara berbagai orang Nusantara dengan masyarakat Aceh.

Keterbukaan masyarakat Aceh terhadap dunia luar juga terlihat bahwa banyak sultan-sultan dari luar Aceh yang memerintah di Aceh dan diterima baik oleh masyarakat Aceh. Di antara sultan yang berasal dari luar Aceh ialah Sultan Iskandar Thani (1636-1641) dari Pahang, Sultan Badrul Alam Syarif Hasyim Damaluddin (1699-1702), Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui Ibnu Syarif Ibrahim (1702-1703) dan Sultan Damalul Alam Badrul Munir (1703-1726), ketiganya berasal dari Arab. Kemudian sultan yang berasal dari Bugis juga pernah memerintah di Kesultanan Aceh yang dimulai oleh Sultan Ala addin Ahmad Syah (Maharaja Lela Melayu) pada tahun

1727-1735 dan beberapa sultan setelahnya.¹⁶

Selain itu, kemajemukan masyarakat Aceh juga terbukti dengan banyaknya nama-nama daerah berdasarkan negeri mereka berasal, maka di Bandar Aceh terdapat nama daerah seperti Gampong Keudah, Gampong Jawa, Surin, Bitai, Lam keneu'eun, dan lainnya. Menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sudah terbiasa hidup berdampingan dengan orang lain dari berbagai macam latar belakang budaya.

Penutup

Penjelasan di atas telah menguak beberapa dimensi budaya Aceh pada zaman dahulu. Kajian mengenai berbagai dimensi budaya Aceh masa lalu—terutama abad ke-17 tentu perlu mendapatkan perhatian, sejarah merupakan pelajaran yang patut dikaji secara lebih seksama untuk kepentingan kekinian. Dalam perjalanan sejarahnya, tentu telah terjadi pasang surut perkembangan budaya masyarakat. Tidak semua budaya masa lalu dapat dikembalikan ke masa kini. Dalam hal ini perlu modifikasi sesuai dengan kondisi kekinian. Paling tidak, terdapat banyak semangat (*spirit*) budaya masa lalu yang dapat ditarik ke masa kini.

Latar belakang persaudaraan muslim pada waktu itu bukan semata karena media bahasa, tetapi lebih jauh lagi karena ideologi ialah agama Islam. Orang datang ke Aceh karena hendak memperdalam ilmu agama Islam. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap rahman dan rahim kepada sesama, hidup seperti orang yang bersaudara, rukun dan damai.

¹⁶ Raden Hoesein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh*, 1984, hlm. 82-84.

Sudirman, S.S. adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas. Hal yang pertama sekali mengedepan ialah : Islam telah menjadi jiwa, darah dan daging masyarakat Aceh. Islam menjadi degup kehidupan keseharian masyarakatnya. Hal ini terungkap dalam sikap, adat-istiadat, kesenian yang masih hidup sampai sekarang. Sebagian besar kesenian Aceh memperlihatkan jejaknya pada tarekat dan tasawuf. Budaya ilmiah telah mentradisi pada masa itu. Itu dapat dilihat dari adanya tulisan-tulisan yang bernilai ilmiah tinggi.

Berikutnya peranan ulama dalam masyarakat sangat kuat. Dimasa lalu ulama sangat berpotensi dalam mengarahkan kehidupan rakyat, memotifasi rakyat untuk bertindak sesuai dengan pengajaran ulama. Namun potensi ulama ini perlu ditingkatkan kembali.

Demikian juga dengan keterbukaan masyarakat Aceh terhadap dunia luar merupakan suatu aset yang sangat potensial untuk terus dikembangkan dalam pembangunan Aceh ke depan.

Potensi-potensi yang ada ini sesungguhnya dapat diakomodasikan bagi pembangunan Aceh lewat peningkatan kehidupan ekonomi, pendidikan, dan pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi angkatan kerja di wilayah Aceh.

Perang Sunggal : (1872-1895) (Tinjauan Historis Terhadap Masalah Konflik Tanah di Sumatera Utara)

Oleh : Iriani Dewi Wanti

Pendahuluan

Sejarah Perang Sunggal, berawal dari persengketaan tentang penyewaan tanah komunal kepada perusahaan perkebunan swasta asing yang berakibat terjadinya konflik berdarah. Pada tahun 1870, Sultan Deli Mahmud Perkasa Alam memberikan tanah subur di wilayah Sunggal, yang membentang dari Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang hingga di pinggiran Selatan Kota Medan, sebagai wilayah konsesi perusahaan perkebunan tembakau *De Rotterdam* dan *Deli Maschapij*. Pemberian tanah ini tanpa melalui perundingan dengan penguasa serta rakyat di wilayah Sunggal sehingga menimbulkan konflik bersenjata. Datuk Badiuzzaman Surbakti, pemimpin masyarakat Sunggal, pada tahun 1872 mengadakan perlawanan atas tindakan sepihak Sultan Deli. Perang pun pecah antara Sultan yang didukung Belanda dan masyarakat Sunggal yang dipimpin Badiuzzaman Surbakti.

Perang ini berlangsung dalam kurun waktu 23 tahun, dari tahun 1872 hingga 1895. Perang ini menjadi pertanda dimulainya sengketa tanah di Sumut yang melibatkan rakyat dengan perusahaan perkebunan. Perang ini mempunyai dua nama yaitu 'Perang Sunggal' dan 'Perang Batak'. Penamaan 'Perang Sunggal' muncul karena perang ini terjadi di daerah Sunggal,¹ tempat tinggal masyarakat Melayu dan masyarakat Karo ketika itu. Perang ini

¹ Sunggal adalah nama salah satu urung dari empat urung di Kerajaan Deli yang juga sebagai kerajaan penyangga dan pimpinannya menjadi penasihat dalam menentukan keputusan Sultan Deli. Sedangkan letaknya di sebelah Utara Kota Medan atau saat ini menjadi nama salah satu kecamatan di Kota Medan yaitu Kecamatan Medan Sunggal

disebut Belanda juga dengan 'Perang Batak' atau *Batak Oorlog* karena medan pertempurannya kebanyakan berada di pegunungan yang didiami oleh masyarakat Batak-Karo.

Pemberontakan Rakyat Sunggal

Pada tahun 1863 dibukanya penanaman tembakau secara besar-besaran disekitar kota Medan oleh *Nienhuys*.² Ini merupakan awal dari permasalahan pertanahan di Sumatera Timur pada masa Kolonial Belanda bahkan hingga sekarang ini. Timbulnya perkebunan-perkebunan tembakau menyebabkan banyaknya tanah yang berada di bawah kekuasaan *Urung Empat Suku* yang berkuasa di sekitar Medan dijadikan kebun tembakau.

Pemberian *konsesi* tanah-tanah oleh Sultan Deli tidak dilakukan dengan jalan musyawarah dengan para pemimpin *urung* sedangkan dalam tata karma Kerajaan Deli kedudukan *datuk* pimpinan *urung* sangat menentukan dalam pemerintahan. Kondisi ini merupakan pelanggaran adat istiadat dan tradisi kerajaan Deli, terutama dalam masalah penyewaan tanah-tanah yang berada dalam wilayah *urung* tersebut. Seluruh pelanggaran terhadap adat istiadat ini terjadi pada masa pemerintahan Datuk Kecil, yaitu

²*Nienhuys* adalah orang yang memperkenalkan tanah Deli ke dunia dengan membuka perkebunan tembakau, yang galur asli daunnya masih terkenal di seluruh dunia hingga kini. Berawal dari keberhasilan *Nienhuys* inilah, di wilayah Karesidenan Sumatera Timur yang kini menjadi Sumatera Utara mulai berdiri perkebunan swasta asing dengan komoditas lain, seperti karet dan kelapa sawit. Perusahaan swasta asing ini menyewa lahan untuk membuka perkebunan dari sultan dan ketua masyarakat adat melalui akta konsesi.

datuk yang menguasai *Urung Sunggal* dan lebih dikenal dengan nama Datuk Sunggal. Pada masa pemerintahan inilah terjadi pertumbuhan perkebunan Belanda sekitar Kerajaan Deli. Pertumbuhan perkebunan-perkebunan tersebut melahirkan kegoncangan-kegoncangan dalam kehidupan masyarakat di Kerajaan Deli terutama pada daerah *Urung Empat Suku* atau disebut kemudian daerah *datuk-datuk* yang empat.

*Kegoncarigan itu disebabkan rakyat Sunggal melihat di sekeliling mereka Deli dan langkat : tanah-tanah rakyat yang subur diberikan untuk konsesi perkebunan tembakau kepada maskapai-maskapai asing sedang keuntungan tidak diberikan kepada rakyat di situ, mulailah Sunggal berjajaga dan menentang cara-cara itu...*³

Contoh di atas merupakan suatu gambaran dari keadaan di urung yang dikuasai oleh Datuk Sunggal. Perasaan tidak puas rakyat pada daerah tersebut juga disebabkan oleh perusakan tata kehidupan masyarakatnya. Sejak adanya perkebunan-perkebunan di sekitar kediaman penduduk, lahirlah suatu kelompok masyarakat yang asing bagi penduduk. Belanda mendatangkan buruh-buruh dari Negari Cina dan India untuk pembukaan perkebunan tembakau itu. Kehidupan masyarakat asing yang berada di dekat desa-desa penduduk sering melahirkan gangguan-gangguan pada desanya seperti kebiasaan berjudi, minuman keras, dan lain-lain. Hal inilah yang sangat menggelisahkan penduduk. Seluruh keadaan ini diharapkan penduduk dapat diakhiri dengan melenyapkan pengaruh Belanda dari daerahnya melalui perlawanan bersenjata. Datuk Sunggal mengetahui bagaimana perasaan rakyatnya pada waktu itu sehingga ia mengadakan persiapan-persiapan untuk mengusir Belanda dari daerahnya dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan dan mengadakan kesiapsiagaan pasukannya. Tindakan dari Datuk Sunggal itu mendapat dukungan dari masyarakat Batak Karo di Pegunungan, karena penduduk yang mendiami daerah urung empat suku itu adalah suku bangsa Karo yang masih mempunyai ikatan

³Muhammad Said, *Koeli Koentrik Tempo Doeloe*, (Medan: Waspada, 1977), hlm. 8

keluarga walaupun mereka telah memeluk Agama Islam.

Layaknya wilayah lain di Nusantara, dahulu rakyat Sumatera Utara tak pernah mengenal kepemilikan individual atas tanah. Kedatangan Belanda yang membuka perusahaan perkebunan menandai dimulainya era kepemilikan individual itu.

Melihat kesiapsiagaan Datuk Sunggal tersebut, Belanda yang mempunyai kepentingan dalam penanaman modalnya di Deli segera mendatangkan pasukannya dari Jawa sebelum keadaan tersebut menjadi lebih parah. Pada 15 Mei 1872 datanglah pasukan ekspedisi Belanda yang pertama dipimpin oleh Kapten W. Koops. Belanda bersama dengan pasukan Kerajaan Deli sebagai penunjuk jalan, mulai melakukan penyerbuan ke daerah perbentengan Sunggal sehingga terjadilah Perang Sunggal. Dalam peperangan ini para pejuang dari Datuk Sunggal tidak hanya bertahan tetapi juga melakukan penyerangan-penyerangan. Mereka membakar bangsal-bangsal tembakau dan mengganggu pekerjaan buruh-buruh perkebunan agar apa yang diharapkan Belanda tidak dapat tercapai.⁴

Karena serangan-serangan ini pihak perkebunan Belanda mengalami kesulitan. Pasukan ekspedisi yang didatangkannya tidak dapat mengatasi keadaan. Bahan makanan yang selama ini didatangkan dari daerah pedesaan tidak dapat masuk ke kota dan perkebunan. Untuk mengatasi ini Belanda terpaksa mendatangkan beras dari Penang. Sementara itu kegiatan dari pejuang-pejuang Datuk Sunggal melahirkan perang urat syaraf sehingga Belanda harus terus-menerus berjajaga-jaga.

Diantara serangan-serangan yang dilakukan oleh rakyat Sunggal yaitu dilakukan di daerah Rantau Betul, Timbang Langkat, rakyat membuat lombang-lombang pesembunyian dan ranjau untuk serdadu Belanda akibatnya berjatuh korban di pihak Belanda. Namun untuk mencari gerilyawan Sunggal Belanda membunuh hanguskan kampung-kampung di sekitar Sunggal. Rakyat juga

⁴SP.Napitupulu, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme di Sumatera Utara*, (Medan: : Depdikbud, 1991), hlm.84

menyerang rumah-rumah administrateur perkebunan dan membakarnya sehingga Belanda mengungsikan para administrateur dan keluaranya ke daerah-daerah yang aman.⁵ Perang ini mendapat perhatian serius dari Kerajaan Belanda karena perlawanan rakyat yang meluas hingga daerah pegunungan Karo dan hampir seluruh Sumatera Timur harus segera dipatahkan.

Untuk mempercepat berakhirnya perang ini Belanda mengirim lagi ekspedisinya yang kedua. Pasukan ini lebih banyak dari yang pertama serta dipimpin oleh Letnan Kolonel Von Homracht. Persenjataannya lebih lengkap dari pasukan pertama karena dilengkapi oleh artileri berkuda. Pasukan ini bertujuan untuk mengadakan penyerahan ke kubu-kubu pertahanan Sunggal,

Perlawanan Datuk Sunggal yang dibantu oleh penduduk pedalaman itu sangat memusingkan Belanda sehingga Belanda mencoba untuk mencari kubu-kubu pertahanan Sunggal. Untuk tujuan tersebut diperlukan meriam-meriam yang dapat menghancurkan kubu-kubu tersebut. Walaupun demikian perlawanan dari pasukan Sunggal tidak dapat dipatahkan oleh Belanda. Berbagai siasat dilakukan Belanda untuk mengamankan daerah sekitar Deli, tetapi tidak membawa hasil. Dengan suatu tipu muslihatnya Belanda mengajak Datuk Kecil atau lebih terkenal lagi dengan Datuk Sunggal untuk berunding menyelesaikan segala perbedaan pendapat.

Usul itu disetujui oleh Datuk Sunggal dan perundingan dilakuk-an pada 25 Oktober 1872. Dalam perundingan itu Belanda melakukan suatu tindakan yang licik. Perundingan tidak diadakan, dan Belanda mengatakan bahwa Datuk Sunggal sekarang menjadi tawanan Belanda. Tindakan Belanda yang merupakan tipu muslihat ini berhasil dan Datuk Sunggal bersama putera-puteranya kemudian dibuang ke Cilacap berdasarkan putusan dari Gubernur Jenderal Belanda yang berkedudukan di Batavia.⁶

Dengan ditawannya Datuk Kecil maka Datuk Badiuzzaman juga ditangkap dengan tipu muslihat Belanda dan dibuang pula ke Cianjur.

⁵ Tengku Luckman Sinar, *Sari Sedjarah Serdang*, (Medan : Penerbit Sendiri, Tanpa Tahun), hlm. 157.

⁶ SP. Napitupulu, *op.cit.*, hlm. 85

Dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Perang Sunggal ini Perang Sunggal pun berakhir pada tahun 1873, tetapi secara kecil-kecilan masih terus terjadi perlawanan terhadap Belanda tidak saja di Deli tetapi juga dibagikan lain dari wilayah Sumatera Timur, misalnya di Asahan dan Sumalungun seperti telah diuraikan di atas. Untuk mengamankan daerah perkebunan yang vital di Sumatera Timur terutama di Deli, pihak perkebunan Belanda mengusulkan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar suku-suku itu dipecah-pecah sehingga mudah dapat dikuasai. Daerah Deli yang banyak hubungannya dengan daerah Karo di pegunungan dipecah karena mereka itu sebenarnya satu keturunan.

Untuk melakukan hal itu perlu dipercepat pengembangan Agama Kristen di daerah tersebut. Pemisahan satu suku tersebut dalam dua agama yang berlainan memudahkan Belanda untuk menguasai daerah ini sehingga perkebunan Belanda dapat aman. Usul ini dapat diterima Belanda sehingga setelah peperangan yang melanda daerah Sumatera Timur dan Tapanuli berakhir, Belanda mengirimkan misi *Nederlandsche Zending Genvotschap* untuk mengembangkan Agama Kristen di Dataran Tinggi Karo.⁷ Jurang pemisah itu semakin meluas karena di daerah pesisir Belanda mendukung tindakan kebijaksanaan raja-raja yang hanya meneri-ma pegawainya tidak bermarga. Penduduk pesisir kemudian menanggalkan marganya agar dapat menjadi warga dari kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur seperti Deli, Serdang dan Langkat. Keadaan ini melahirkan pertentangan antara penduduk pantai dengan daerah pedalaman, tetapi dengan politih pecah belah Belanda berhasil berkuasa di daerah Sumatera Timur.

Dari Perang Sunggal Hingga Sengketa Tanah

Telah diulas di atas kedatangan *Nienhuys*, pengusaha *onderneming* (perkebunan) asal Belanda ke tanah Deli, yang sekarang menjadi wilayah kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, pada Juli 1863

⁷ *Ibid.*

dianggap sebagai awal mula dari carut-marutnya sengketa tanah di Sumut.

Menurut Saidin sultan atau ketua masyarakat adat menyewakan tanah-tanah tersebut dengan tenggang waktu selama 75 hingga 99 tahun. Sultan bertindak atas nama masyarakat hukum adat dan diketahui gubernur jenderal sebagai wakil Kerajaan Belanda di Hindia Timur.

Ahli hukum agraria dari Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Muhammad Yamin Lubis, mengungkapkan, tindakan Sultan Deli menyewakan tanah adat ke perusahaan swasta asing telah mengubah konsep kepemilikan tanah di wilayah Kesultanan Deli.

"Seperti juga di wilayah lain di Indonesia, di Deli tanah itu milik Tuhan yang diberikan kepada rakyat. Atas nama rakyat, raja kemudian mengorganisasinya. Kepemilikan tanah tetap atas nama rakyat, hanya saja yang mengorganisasi raja. Ini berbeda dengan hukum agraria Barat, di mana raja adalah pemilik keseluruhan tanah."⁸

Konsep hukum agraria Barat yang dibawa ke Deli dimulai saat perusahaan perkebunan swasta menyewa tanah langsung dari sultan tanpa melibatkan rakyatnya. Perusahaan perkebunan ini menyewa tanah langsung ke raja, padahal rakyatlah yang punya. Mereka membuat kontrak dengan raja sendirian. Hak-hak kepemilikan tanah mulai terindividualisasi. Jika masyarakat ingin diakui sebagai pemilik sah atas tanah, mereka harus mendaftar dan memiliki surat atau sertifikat, ujarnya.

Menurut Yamin, hukum agraria Barat yang dibawa Belanda juga memperkenalkan masyarakat Deli dengan konsep hak ulayat. Setelah tanah komunal mereka disewakan sepihak oleh sultan, perusahaan perkebunan memberikan tanah untuk dikelola rakyat. Tujuannya agar rakyat tidak merambah tanah yang telah dikonsesikan kepada perusahaan perkebunan. Ketika Jepang menjadi penguasa di tanah Deli, hampir tak ada aturan soal

tanah. Baru setelah Indonesia merdeka, negara mulai mengurus bukti kepemilikan tanah masyarakat maupun perkebunan.

Di Sumatwera Utara setelah terbit Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah oleh Rakyat, pemerintah mulai mengatur bukti penguasaan tanah bekas perkebunan swasta asing oleh masyarakat. Masyarakat mengenal kartu registrasi penggunaan tanah (KRPT), surat keterangan tanah (SKT), girik, hingga Ipeda. Di Sumut, selain surat tersebut, ada juga Grant C (controleur), bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan perkebunan kepada rakyat; *Grant Deli Maschapij*, bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan perusahaan tembakau Deli Maschapij; dan Grant Sultan, bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan sultan kepada rakyat, akan tetapi surat tersebut tak beraturan. Ada yang keluar di atas tanah yang bukan haknya. Setelah terbit UU No 5/1960 tentang Agraria, negara memberikan kesempatan kepada pemilik surat tersebut untuk mengonversi hak mereka atas tanah dengan sertifikat, baik sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, maupun sertifikat hak guna pakai.

Namun, yang terjadi sebelum ada konversi, tanah ini sudah diperjualbelikan dan itu tidak di lembaga yang ditunjuk UU. Akibatnya, sampai sekarang di Medan, SK Camat hampir rata menjadi masalah. Padahal, SK Camat itu bukan bukti kepemilikan, hanya surat yang menunjukkan tanah itu terletak di suatu tempat. Mestinya, tanah yang menjadi milik negara dikonversi menjadi hak penguasaan, tanah yang menjadi milik perkebunan dikonversi jadi hak guna usaha (HGU), dan tanah yang menjadi milik rakyat dikonversi jadi hak milik keperdataan. Di dalam kehidupan yang sebenarnya, rakyat kita tak pernah memiliki bukti kepemilikan tertulis. Rakyat juga tak mau berurusan dengan lembaga pemerintah yang mengatur hak mereka, seperti badan pertanahan karena takut bakal dipunguti pajak.⁹

⁹ Lebih lanjut dapat dibaca dalam buku K Saidin, Kepala Pertanahan Kesultanan Deli, dalam buku *Sengketa Tanah dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus di Sumatera Utara, Tanah Karo Online*, 2006

⁸ *Waspada Online*, 28 Juni 2007

Rakyat vs Perkebunan

Kebiasaan rakyat yang enggan memiliki bukti tertulis penguasaan mereka atas tanah menjadi bibit baru sengketa tanah ketika pemerintah menasionalisasi perkebunan swasta menjadi perusahaan perkebunan negara (PTPN). Masyarakat Deli yang dulunya diberi hak ulayat oleh sultan dan perusahaan perkebunan swasta asing tak lagi bisa menikmatinya ketika perkebunan negara tak lagi mengakui hak mereka. Rakyat kemudian menuntut haknya. Mereka tak segan menyerobot tanah perkebunan seperti yang terjadi pada konflik masyarakat Melayu Deli dengan PTPN II.¹⁰ Konflik pun meluas, tak lagi antara masyarakat Melayu dan perusahaan perkebunan, seperti PTPN II, tetapi antara bekas buruh kontrak dari Jawa hingga pendatang dari Tapanuli.

Sengketa tanah yang melibatkan bekas buruh perkebunan dari Jawa dengan perusahaan perkebunan, antara lain, terjadi dalam kasus pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra) yang banyak mendampingi masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan mencatat, sengketa jenis ini terjadi merata di semua wilayah Sumut.

Di Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, misalnya, rakyat yang dulu membuka hutan dan mendirikan perkampungan sendiri tiba-tiba tanahnya diklaim sebagai bagian dari HGU milik Perusahaan Perkebunan (PP) London Sumatera.

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) mencatat jenis konflik lain antara petani dan perusahaan perkebunan. Menurut Sekretaris Eksekutif Bakumsu Mangaliat Simarmata, 301 keluarga di Desa Suka Rame dan Desa Sono Martani, Kecamatan Kualu Hulu, harus kehilangan tanah akibat ditipu perusahaan perkebunan PT Sawita Leidong Jaya dan PT Grahadura Leidong Prima. Kedua perusahaan itu menjanjikan lahan garapan baru bagi petani di kedua desa kalau mereka melepas

tanah garapannya. Rakyat yang memang menggarap lahan di hutan register 4 mau memberikan tanah garapan mereka kepada kedua perusahaan tersebut. Bupati Labuhan Batu pun memberikan izin prinsip kepada kedua perusahaan membuka perkebunan kelapa sawit di hutan register 4. Namun, janji kedua perusahaan tidak dipenuhi. Rakyat kehilangan tanah garapan. Saat mereka merambah dan merusak kebun sawit kedua perusahaan, polisi pun bergerak. Dua orang warga desa ditahan di Kepolisian Daerah Sumut.¹¹

Kasus lain adalah sengketa tanah Pando Perengan di Afdeling 13 Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun. Masyarakat yang umumnya datang dari Pulau Samosir pada tahun 1950 menggarap bekas perkebunan Belanda yang dibiarkan telantar. Yang mereka garap adalah rawa-rawa yang dikenal dengan istilah Pando dan tanah penghubung dengan daratan yang disebut Perengan karena bentuknya yang landai. Kini lahan yang mereka garap diklaim merupakan bagian dari HGU PTPN III. Mereka yang mencoba menuntut kembali haknya dicap komunis.¹²

Penguasaan Hutan

Jenis sengketa tanah lain yang juga terjadi di Sumut adalah penguasaan lahan oleh masyarakat di hutan yang telah gundul oleh pembalok liar. Hardi Munthe dari Walhi Sumut mencatat kasus ini terjadi di hutan register 1 Kabupaten Simalungun. "Sebanyak 56 petani ditangkap polisi dengan alasan merambah hutan. Padahal, hutan yang mereka rambah sudah gundul oleh pembalok liar. Petani yang katanya merambah malah mendapat pembinaan dari dinas kehutanan setempat untuk mengelola hutan. Dengan alasan operasi hutan lestari, mereka malah ditangkap, sementara pengusaha yang dulu

¹¹ *ibid*

¹² Peristiwa Bandar Betsy selalu dikaitkan dengan masalah pemberontakan PKI di Sumatera Utara meskipun saat ini telah diulas bahwasanya peristiwa ini lebih cenderung pada masalah sengketa tanah.

membalak sampai sekarang dibiarkan bebas," kata Hardi.

Solusinya, menurut Hardi, rakyat diberi hak pengelolaan hutan. Hardi mengatakan, hampir semua rakyat di Sumut yang tinggal di sekitar hutan punya kearifan lokal. Di Tapanuli Selatan dikenal istilah hutan harangan (larangan), wilayah hutan yang terlarang dieksploitasi warga. "Pengelolaan hutan bisa sustainable dan rakyat bisa mendapat keuntungan. Di Simalungun, rakyat sudah menanami bekas hutan yang gundul dengan pohon seperti kemiri, mangga, dan durian. Namun, mengapa mereka malah ditangkapi. Dengan tanaman jenis itu, daerah tangkapan air terjaga, sementara rakyat bisa dihidupi. Sementara, kalau pengusaha yang membuka hutan, bakal monokultur dengan ditanami tanaman seperti sawit dan karet," kata Hardi.¹³

¹³ Khaeruddin, *Dari Perang Sunggal sampai Lahan Kuala Namu, Tanah Karo Online*, 30 Juni 2007.

Irini Dewi Wanti, S.S. adalah Ajun Peneliti Muda pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Penutup

Dalam masyarakat yang plural berbagai hal dapat menjadi dasar terjadinya konflik baik internal maupun eksternal. Contoh kasus dalam uraian tulisan ini akar konflik yang terjadi pada saat ini adalah kelanjutan dari konflik yang terjadi pada abad 19. Perbedaannya adalah pertentangan yang dilakukan oleh rakyat pada masa pemerintahan yang berbeda.

Namun bagaimanapun kepentingan rakyat tetap harus diselesaikan seadil-adilnya karena konflik internal maupun eksternal tentu akan merugikan pihak manapun bila tidak diselesaikan secara arif.

¹⁰ *ibid*

Trepes (Two Rivers) : Basis Batalyon Tentara Keamanan Rakyat (TKR) B di Sumatera Timur (1945-1947)

Oleh : Indra Afkhar

Pendahuluan

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu (14 Agustus 1945), maka berakhirlah Perang Dunia II (Perang Asia Pasifik) sehingga terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang ingin dicapai bangsa Indonesia bertujuan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Puncaknya terbukti pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya setelah Bung Karno dan Bung Hatta dengan tekad bulat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Di Sumatera Timur proses informasi proklamasi kemerdekaan agak terlambat karena sarana komunikasi yang belum mampu untuk mengekspos berita tersebut.

Berita Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibawa Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Dr. M. Amir sebagai utusan ketika Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Berita itu dibawa pada 24 Agustus 1945 dimulai dari Palembang, terus ke Jambi, selanjutnya ke Sumatera Barat, dan tiba di Tarutung dengan menjumpai F.L. Tobing untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya rombongan Mr. Teuku Mohammad Hasan tiba di Medan pada 29 Agustus 1945.

Pada 17 September 1945 Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan pertemuan di Gedung Syu Sangi Kai di Medan.¹ Dalam pertemuan itu sangat sedikit yang hadir, misalnya Abdul Karim MS sebagai pemimpin BOMPA (Badan Oentok Membantoe

Pertahanan Asia). Selanjutnya pada 21 September 1945 bertempat di Gedung BOMPA (sekarang Gedung Juang 45 Jl. Pemuda Medan). Diadakan rapat dengan keputusan membentuk organisasi yang bernama Barisan Pemuda Indonesia (BPI). Akhirnya proklamasi dapat diproklamlirkan di kota Medan pada 30 September 1945 di Gedung Taman Siswa (Jl. Amplas) di mana Mr. Teuku Mohammad Hasan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.² Pada 4 Oktober 1945 dilanjutkan dengan kegiatan mengibarkan bendera merah putih di beberapa daerah/lokasi di kota Medan sekitarnya. Hal ini dibuktikan pada 6 Oktober 1945 bertempat di lapangan Fukuraido (sekarang lapangan Merdeka Medan) diadakan upacara penaikan bendera merah putih dan ternyata sangat didukung oleh masyarakat kota Medan.

Di Jakarta pada 5 Oktober 1945 ada keputusan Presiden RI bahwa Badan Keamanan Rakyat (BKR) diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan alasan untuk memperkuat keamanan terutama mententeramkan perasaan masyarakat.³ Pada 10 Oktober 1945 berdasarkan perintah Presiden Soekarno maka dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Sumatera Timur yang diketuai oleh Ahmad Tahir. Dalam perkembangannya pada 5 Nopember 1945 TKR di Sumatera Timur mengalami perubahan menjadi 3 bagian, yaitu TKR A yaitu pasukan infantri yang memiliki pasukan dengan pimpinannya antara lain Kasim, Abdul Karim, Wiji Alvisah, Nazaruddin, Jamin Ginting, Martinus dan Burhanuddin. TKR B yaitu pasukan khusus yang dipimpin oleh Nip Karim. Pasukan ini merupakan kumpulan

pemuda-pemuda jalan Gurami, Serdang dan Sentosa. dan TKR C yaitu pasukan bekas tentara KNIL (Koninklijke Nederlandsche Indische Lager) yang dipimpin oleh Letda Sunarto.

Dari TKR B inilah muncul istilah TREPES, karena basisnya berada di antara Sungai Babura dan Sungai Deli. Trepes lebih dikenal karena masyarakat menyebutnya trepes, yang sesungguhnya berasal dari kata Two Rivers. Two Rivers merupakan sebutan yang diberikan oleh tentara Inggris untuk areal perkebunan tembakau yang berada di antara Deli Tua dengan Pancur Batu di Kecamatan Namorambe. Pasukan Trepes adalah pasukan yang berani dan kuat sehingga menjadi tantangan bagi tentara Sekutu maupun NICA (Belanda).

Basis Batalyon TKR B

Trepes berada sekitar 18 Km di sebelah Selatan kota Medan, yang menjadi basis Batalyon TKR B dalam mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Timur. Objek Trepes sebagai kajian ini karena menjadi bagian sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Sumatera Timur yang bersifat lokal namun secara tidak langsung tentu menyangkut kepentingan nasional.⁴ Trepes menjadi basis (markas) tentara pejuang dengan alasan oleh Kapten Nip Karim antara lain memenuhi syarat bagi adanya konsentrasi pasukan terutama akomodasi, perbekalan dan hubungan (komunikasi) tidak begitu menyulitkan.

Ada pendapat yang menjadi pertimbangan, mengapa Two Rivers (Trepes) menjadi basis Batalyon TKR B, antara lain :

1. Letaknya yang strategis, di mana lokasi markas dengan kota hanya 18 Km. Sebelah Timur ke Deli Tua, dan sebelah Barat ke Pancur Batu, serta sebelah Utara ke Polonia dan sebelah Selatan ke Sempahe. Di kiri dan kanan markas

terdapat sungai, dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang terdapat perkebunan tembakau. Apabila tentara musuh masuk maka akan diserang dari segala penjuru yang telah dikuasai medannya. Pasukan Batalyon TKR B akan mudah menggempurnya dengan menaiki bukit yang ada disekitarnya.

2. Pengiriman perbekalan sangat mudah, di mana wilayah perkebunan tembakau memiliki 3 gudang yang tidak ada pengawalannya sehingga dengan mudah pejuang mendapatkan bahan makanan, misalnya tersedianya 2 ribu ton beras, 200 ekor lembu, dan sebagainya. Daerah Two Rivers (Trepes) ini merupakan daerah pertanian terutama tanaman sayur-mayur yang didatangkan dari Tanah Karo melalui Sempahe.
3. Sarana penyaluran air leding untuk kota Medan dan Belawan, di mana menjadi kekuatan yang sangat penting untuk memukul musuh yang berada di Medan sekitarnya.

Basis Trepes bukan hanya menjadi markas TKR B tetapi terus berlanjut dengan ditematkannya Trepes menjadi Markas Besar Resimen Laskar Rakyat Medan Area (RLRMA) ketika resimen ini terbentuk pada 10 Agustus 1946.⁵ Hal ini membuktikan Trepes merupakan tempat yang strategis untuk medan pertempuran maupun basis perlawanan terhadap tentara Sekutu maupun Belanda.

Pasukan TKR B terus mengalami perkembangan setelah bertambahnya anggota menjadi prajurit yang berasal dari pemuda-pemuda yang bertempat tinggal di jalan Gurami dan jalan Serdang Medan. Pasukan TKR B melakukan latihan militer secara intensif tanpa ada gangguan dari tentara Sekutu maupun Belanda (NICA). Justru prajurit yang berasal dari KNIL yang bergabung dengan Sekutu banyak yang melarikan diri dan kembali bergabung ke pihak Indonesia. Daerah yang dituju adalah

¹ Tanpa Pengarang, *Republik Indonesia Prpopsi Sumatera Utara*, Medan : Jawatan Penerangan Prpopsi Sumatera Utara, 1953., hlm : 3 - 8

² *Ibid.*, hlm : 27-35

³ Osman Raliby, *Documenta Historica*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1953), hlm : 50 -53

⁴ Sartono Kartodirjo, *Lembaran Sedjarah No.6*, Jogyakarta : Seksi Penelitian Jurusan Sejarah FS UGM, 1970, hlm : 2 -3

⁵ Tim Penulis Kodam II/BB, *Pertempuran Medan Area*, Medan : Tanpa Penerbit, 1982, hlm : 1 - 5

Two Rivers (Trepes) karena aman tanpa dikejar-kejar oleh pasukan Sekutu maupun Belanda (NICA).

Pasukan TKR B yang berbasis di Trepes justru melakukan berbagai serangan ke kota Medan untuk bertempur dengan markas tentara Sekutu. Pasukan TKR B ini dikerahkan secara bergiliran ke kota Medan untuk menghalangi gerakan tentara Sekutu sehingga terjadi berbagai pertempuran secara sporadic di kota Medan sekitarnya. Pertempuran sering terjadi setelah Maklumat TED Kelly pada 18 Oktober 1945 yang bertekad untuk memasuki kota Medan. Namun selalu dihalangi oleh pasukan dan pejuang kemerdekaan Indonesia, seperti yang berasal dari TKR B yang berpusat di Trepes (Two Rivers).

Dalam perkembangannya terbukti TKR B telah memiliki berbagai jenis senjata, seperti senjata Karben Stegun, senapan mesin ringan, dan senjata lainnya yang berjumlah 60 pucuk. Senjata-senjata itu diperoleh dengan berbagai cara, baik dengan cara mengambilnya dari simpanan Jepang dan yang dilarikan oleh prajurit-prajurit yang membelot ke pihak Indonesia. Dengan senjata yang dimiliki maka pasukan TKR B tetap menjadi populer dan dikagumi oleh rakyat di kota Medan sekitarnya.

Akibat pertempuran yang sering terjadi menyebabkan prajurit TKR B merasakan betapa pentingnya senjata api dalam pasukan tempur. Hal ini mendorong semangat prajurit TKR B mencari senjata semakin kuat, terutama gudang senjata yang dimiliki Jepang untuk direbut senjatanya. Dalam suatu peristiwa yang terjadi di Marindal, para pejuang berhasil merampas senjata Jepang dalam jumlah yang besar.⁶ Senjata-senjata tersebut oleh para pemuda dan rakyat diangkut lalu diserahkan kepada prajurit TKR B yang bermarkas di Trepes.

Ternyata perampasan senjata diketahui oleh Sekutu sehingga diperintahkan

agar untuk merampas kembali senjata-senjata tersebut. Hal ini terbukti bocor informasinya sehingga para pemuda mengambil langkah-langkah yang cepat agar senjata yang dimiliki dapat diselamatkan. Trepes menjadi salah satu sasaran yang akan diserang oleh pasukan Sekutu, namun sangat sulit untuk menembusnya. Selain itu senjata yang adapun disimpan di berbagai tempat yang sangat sulit ditemukan, karena disimpan di dalam tanah maupun tempat-tempat yang sulit diketahui keberadaannya.

Trepes Simbol Perjuangan Pasukan TKR B

Pada 7 Desember 1945 terjadi berbagai kerusakan yang dilakukan Sekutu di kota Medan, seperti merampas dan menangkap pemuda-pemuda pejuang serta menggeledah berbagai gedung yang dianggap sebagai tempat pertemuan para pejuang kemerdekaan. Aksi Sekutu ternyata dibalas oleh pasukan TKR B yang terus melakukan perlawanan dengan menembaki asrama Sekutu maupun NICA (Belanda) yang berada di kota Medan. Pada 10 Desember 1945 tentara Sekutu melakukan gerakan militer untuk menghancurkan pertahanan TKR B di Trepes (Two Rivers). Akibatnya terjadi tembak menembak antara pasukan TKR B dengan pasukan Sekutu di daerah Deli Tua, sehingga pertempuran menjadi sengit yang memakan korban jiwa dari pihak sekutu. Truk yang meraka pakai terbakar dan jungkir balik kedalam parit.⁷

Pada 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan di kota Tebing Tinggi yang dihadiri pimpinan kesatuan, dalam pertempuran tersebut diputuskan untuk membentuk Komando Laskar Rakyat Medan Area (KLRMA). Dalam komando ini tergabung pasukan TKR B yang telah beralih menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia). Batalyon B ini sudah dikenal reputasinya dalam perjuangan. Berdasarkan kekuatan yang

ada maka Kapten Nip Karim terpilih menjadi komandan Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Oleh Nip Karim selanjutnya disusun staf komando resimennya dengan mengikut sertakan unsur perjuangan baik tentara maupun laskar yang ada di Sumatera Timur.

Nip Karim menetapkan Trepes menjadi tempat markas perjuangan, dan ternyata tidak mendapat protes dari pimpinan atau komandan yang lain karena tidak ada alasan untuk menolaknya terutama yang karena strategis Trepes sebagai basis Batalyon pejuang kemerdekaan di Sumatera Timur. Adapun susunan Resimen Laskar Rakyat Medan Area, antara lain :

1. Komandan : Kapten Nip Karim (Komandan Batalyon B)
2. Kepala Staf Umum : Marzuki Lubis (Napindo)
3. Kepala Staf Laskar : Kapten Alwi Nurdin (Staf Divisi IV)

Resimen Laskar Rakyat Medan Area ini memiliki 4 Batalyon dan 1 Batalyon khusus (Batalyon B) yang bermarkas di Trepes. Adapun 4 Batalyon yang lain, terdiri dari :

1. Batalyon I di Tembung (Medan Timur) dibawah komando Jacob Lubis.
2. Batalyon II di Sunggal (Medan Barat) dibawah komando Abdul Hamid.
3. Batalyon III di Hamperan Perak (Medan Utara) dibawah komando Berani Pohan.
4. Batalyon IV di Tanjung Morawa (Medan Selatan) dibawah komando Yahya.⁸

Dalam melaksanakan operasi militer terutama untuk menetapkan garis demarkasinya, maka peranan basis Resimen Laskar Rakyat Medan Area di Trepes sangat menonjol. Pada saat diadakan gencatan senjata ketika perundingan sedang berlangsung ternyata Trepes memegang peranan yang sangat besar. Trepes tetap bertahan sebagai garis demarkasi yang dikehendaki oleh pasukan Tentara Republik Indonesia.

⁸ Tim Asistensi Pangdam II/BB, *Sejarah Perjuangan Komando Daerah Militer II Bukit Barisan*, Medan : Dinas Jarahdam II Bukit Barisan, 1977., hlm : 168 -172

Gencatan senjata yang berlangsung sejak 27 Oktober 1946 di mana tidak ada pertempuran antara kedua belah pihak. Namun Trepes menjadi salah satu tempat yang strategis untuk mematahkan semangat juang pasukan Belanda di mana pasukan Tentara Republik Indonesia memutuskan air leding untuk kota Medan. Cara yang dilakukan dengan mengalihkan air bersih ke saluran sungai terutama untuk kapal yang dimiliki Inggris yang berlabuh di Belawan sangat membutuhkan air minum. Menghadapi blokade pasukan Indonesia, maka pasukan Inggris minta berunding agar saluran air dipulihkan kembali. Akan tetapi pihak pasukan Indonesia juga meminta agar aliran listrik ke kota Pancur Batu dan Binjai dipulihkan juga. Akhirnya disepakati, namun blokade bahan makanan tetap berjalan terus.

Saat berlangsung pertempuran untuk menentukan batas kekuasaan kedua belah pihak, maka aliran air secara total diputuskan kembali. Kondisi ini terus dijalankan walaupun pihak Sekutu menyatakan akan tetap menyalurkan aliran listrik ke Pancur Batu. Akibatnya pertempuran terus berlanjut namun karena posisi Trepes cukup strategis sehingga kedudukan Trepes sebagai markas para pejuang tetap bertahan. Pasukan Sekutu beranggapan Trepes sangat menentukan sehingga pasukan Sekutu mengerahkan pasukan Angkatan Udara dengan melakukan pengeboman terhadapnya.

Serangan balik yang dilakukan pasukan pejuang dilaksanakan pada malam hari, taktik ini ditempuh karena mengingat peralatan senjata yang dimiliki sangat kurang. Serangan itu dilancarkan dari berbagai sudut, baik dari Deli Tua maupun Gedung Johor hingga ke Polonia, maka serangan musuh selalu gagal dan tidak pernah sampai ke Trepes sebagai basis Tentara Republik Indonesia. Namun kehebatan Trepes sebagai basis perjuangan mulai turun pamornya setelah adanya penyimpangan dari laskar lain yang keluar dari Resimen Laskar Rakyat Medan Area, seperti yang dilakukan oleh Timur Pane sebagai komandan Laskar Naga Terbang (anggota Napindo) yang menetapkan

⁶ Tim Asistensi Pangdam II/BB, *Sejarah Perjuangan Komando Daerah Militer II Bukit Barisan*, Medan : Dinas Jarahdam II Bukit Barisan, 1977, hlm : 608-612.

⁷ Tanpa Pengarang, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Medan : Biro Sejarah Prima, 1976, hlm : 250 -255

berdiri sendiri.⁹ Keadaan ini menyebabkan kekuatan Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang berkedudukan di Trepes semakin berkurang dan akhirnya lemah. Pembagian kekuatan yang tidak merata ini menyebabkan kesatuan komando tidak efektif lagi.¹⁰

Pada 7 Januari 1947 diadakan pertemuan di Bireuen (Aceh) yang dihadiri oleh pimpinan pasukan, baik Divisi Gajah I, Divisi Gajah II, RLRMA dan Laskar Rakyat Aceh diputuskan untuk membubarkan Resimen Laskar Rakyat Medan Area, dan diganti dengan Komando Medan Area (KMA) dengan komandannya R. Soeipto dan Kepala Stafnya Mayor Tengku Nuridin. Dengan serah terima dan pergantian komandan ini maka Markas Medan Area bukan lagi di Trepes tetapi dipindahkan ke Tanjung Morawa.

Rencana pemindahan Batalyon B dari Trepes ternyata mendapat penolakan dari Nip Karim sekaligus tindakan atau protes akibat dibubarkannya Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Alasannya, bahwa kesulitan yang dihadapi RLRMA adalah masalah biaya dan kebutuhan bahan makanan bukan menyangkut komando (pimpinan) yang terpecah-pecah. Latar belakang persoalan ekonomi dan strategi militer menunjukkan wilayah perkebunan dikuasai oleh laskar Resimen Naga Terbang (Napindo) yang dipimpin Timur Pane, bermarkas di Perbaungan.

Saat agresi militer Belanda I (21 Juli 1947) serangan Belanda ke Trepes mengakibatkan pasukan Indonesia mundur dan menyeberang ke sungai Deli dan terus ke Pancur Batu. Pada 27 Juli 1947 pasukan yang hebat itu mengalami tekanan terus mundur ke Patumbak, terus ke Galang sampai ke Bangun Purba.¹¹

⁹ *Op.cit.*, hlm 455 - 460

¹⁰ Arifin Pulungan, *Kisah Dari Pedalaman*, Medan : Dian Corporation, 1979., hlm : 30 -35

¹¹ Jamin Ginting, *Bukit Kadir*, Medan : CV.Umum, 1964, Hal : 25 - 30.

Drs. Indra Afkhar, M.Hum adalah Dosen Fakultas Sastra Jurusan Sejarah USU Medan

Trepes yang ditinggalkan akhirnya dibumi hanguskan oleh pasukan Nip Karim dengan tujuan agar pasukan musuh tidak dapat mempergunakan Trepes sebagai basis pertahanan tentara Belanda.

Penutup

Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ternyata masyarakat Medan khususnya dan Sumatera Timur pada umumnya membentuk pasukan dan laskar perjuangan. Akibat desakan pasukan Sekutu dan NICA (Belanda) maka pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) B dan Laskar Rakyat menempatkan Two Rivers atau yang dikenal dengan Trepes menjadi basis Batalyon karena memenuhi syarat yaitu letaknya yang strategis dan mudahnya penyaluran bahan makanan, dan sebagainya.

Trepes sebagai basis batalyon tentara Indonesia memegang peranan penting dalam mengatur serangan ke markas Sekutu maupun Belanda (NICA). Namun akibat timbulnya dualisme komando antara Nip Karim dan Timur Pane yang tidak mau bergabung dengan Komando Medan Area maka peranan Trepes semakin merosot dan akhirnya Trepes hanya menjadi simbol bagi para pejuang kemerdekaan di Sumatera Timur.

Kopi: Kajian Sejarah Komoditas dan Ekonomi di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah

Oleh : Deni Sutrisna

Pendahuluan

Kopi yang saat ini sudah dikenal luas sebagai minuman dengan cita rasa khas dan dipercaya mempunyai manfaat besar bagi peminumnya, telah dikenal sejak abad-abad sebelum Masehi. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa biji-bijian yang diduga adalah kopi telah ditemukan pada Kitab Injil Perjanjian Lama. Dan menurut sumber tertulis kopi berasal dari daerah jazirah Arab. Karena manfaat kopi yang besar, maka tanaman ini cepat menyebar ke seluruh dunia, terutama Asia dan Amerika Latin. Sampai saat ini beratus spesies kopi telah ditemukan, tetapi yang diperdagangkan hanya beberapa spesies yang memang menguntungkan untuk diusahakan. Sementara spesies lain masih menjadi kekayaan dunia yang menunggu pengembangan.

Keterkaitan dunia Arab dengan kopi juga dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa istilah "kopi" berasal dari bahasa Arab *quahweh*. Dari dunia Arab, istilah tadi diadopsi oleh negara-negara lainnya melalui perubahan lafal menjadi *cafe* (Perancis), *caffè* (Italia), *kaffe* (Jerman), *koffie* (Belanda), *coffee* (Inggris), dan *coffea* (Latin). Namun diantara pakar masih belum ada persesuaian pendapat tentang daerah asal kopi. Berbagai daerah telah diidentifikasi sebagai daerah dan habitat asal tanaman kopi oleh berbagai pakar dari berbagai keahlian. Linnaeus seorang Botanikus dalam sebuah tulisannya yang terbit tahun 1753 berpendapat bahwa habitat kopi terletak diantara daerah subur Saudi Arabia yang disebut Arabia Felix, yang kemudian dikenal dengan nama Mekkah. Karenanya dia memberi nama tanaman tadi *Coffea Arabica*. Akan tetapi di dalam tulisannya kemudian di tahun 1763 dia menyebutkan daerah asal kopi sebagai

"Arabia" dan "Ethiopia", meskipun dia lebih memberi titik tekan pada Arabia, dan hanya menyebutkan Ethiopia dalam kaitannya dengan Arabia.

Pendapat lain dari Lankester (1832) mengatakan bahwa *Coffea Arabica* dibawa dari Persia ke Saudi Arabia. Sedangkan kajian historis yang dilakukan oleh Southard (1918) membawa pada kesimpulan bahwa pada abad XI bangsa Arabian yang membawa biji-bijian kopi dari suatu daerah di Ethiopia yang disebut Harar. Botanikus De Condolle, sebagaimana dilaporkan oleh Fauchere (1927) berpendapat bahwa kopi merupakan tanaman liar yang tumbuh di Abyssiria, Ethiopia, Sudan, Mozambique dan Guinea. Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa nampaknya sebagian besar para ahli mengidentifikasi Ethiopia sebagai daerah asal *Coffea Arabica*. Jenis kopi yang kemudian diketemukan di pegunungan Ruwenzori (Uganda), sekitar 450-600 km di selatan habitat asal *Coffea Arabica*, ternyata dari spesies yang meskipun dekat, akan tetapi berbeda. Adanya kenyataan bahwa jenis kopi Arabika telah berabad-abad tumbuh di Ethiopia dalam hutan-hutan alami, serta daya adaptasinya dengan kondisi ekologi setempat memberi alasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa jenis kopi ini memang berasal dari Ethiopia, khususnya dataran tinggi Abyssiria di provinsi Galla, Anarea, Kaffa dan Raume, meskipun daerah habitat tersebut juga diperkirakan dari hutan-hutan tropis di selatan pegunungan Abyssiria, dan di bagian utara sampai ke Sudan Tenggara.

Kopi Indonesia pada masa Kolonial

Komoditi kopi telah memainkan peranan penting dalam sejarah perekonomian Indonesia semenjak periode awal penetrasi kapitalisme internasional ke

dalam masyarakat pra-kapitalis Indonesia. Semenjak diperkenalkannya kopi jenis Arabica dari Malabar ke Jawa sekitar tahun 1699 oleh kaum kapitalis Belanda, tanaman kopi ini mengalami perkembangan yang amat pesat. Laju perkembangan tanaman kopi ini tidak lepas dari Sistem Tanam Paksa (*cultuur stelsel*) yang diperkenalkan Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1830, melalui *stelsel* ini rakyat diwajibkan untuk menanam komoditi ekspor milik pemerintah, termasuk kopi pada seperlima luas tanah yang digarap, atau bekerja selama 66 hah di perkebunan-perkebunan milik pemerintah. Kalau diantara tahun 1830-1834 produksi kopi Arabica di Jawa baru mencapai 26.600 ton, maka 30 tahun kemudian produksi kopi tadi meningkat menjadi 79.600 ton. 1

Adanya tanah yang subur dan iklim yang cocok di Jawa, serta pengerahan tenaga kerja melalui sistem tanam paksa ditambah pula dengan dipegangnya monopoli perdagangan kopi di tangan pemerintah, telah memungkinkan eksploitasi dan pentransferan nilai lebih (*surplus values*) yang cukup besar ke Negeri Belanda, yang ikut menopang pertumbuhan ekonomi Belanda secara tajam. Dalam pada itu diundangkannya *Agrarische Wet* (UU Agraria) pada tahun 1870 yang memberi peluang bagi kaum kapitalis untuk menyewa tanah dalam jangka panjang telah mendorong tumbuhnya sejumlah *koffie onderneming* terutama sekali di Jawa Timur. Kesemuanya telah membawa produksi kopi ke titik puncaknya di abad ke XIX yang pada tahun 1880-1884 mencapai 94.400 ton (Creutzberg, 1975). Kopi memainkan peranan yang jauh lebih penting dibandingkan dengan gula tebu.

Kalau nilai ekspor kopi rata-rata antara tahun 1865-1870 mencapai 25.965.000 gulden, maka dalam periode yang sama nilai ekspor rata-rata gula tebu hanyalah mencapai 8.416.000 gulden (*Handelsstatistiek Java 1823-75*, label 10-11,

¹ Creutzberg, *Changing Economy in Indonesia : The Export Crops 1816-1940*. Amsterdam, 1975

p.39-41).² Namun berjangkitnya penyakit tanaman kopi, pes dan teknik budi daya tanaman kopi yang tidak memadai, telah membawa penurunan produksi kopi secara drastis, yang diantara tahun 1910-1914 mencapai titik terendahnya sebesar 35.400 ton. Peristiwa tragis tadi justru membuka *frontiers* baru dalam budi daya tanaman kopi dalam wujud diperkenalkannya varietas kopi *Robusta* yang lebih tahan penyakit dan mempunyai produktivitas yang lebih tinggi. Varietas kopi *Robusta* ini segera menyebar ke daerah lain, khususnya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung dan Aceh/NAD.

Varietas kopi Arabika yang lebih sulit pembudidayaannya tinggal menempati lahan-lahan pertanian sempit pada ketinggian antara 900 - 1.000 meter di atas permukaan air laut, dan merupakan *enclave* di daerah Aceh Tengah (Takengon), Sumatera Utara (Sidikalang, Lintongnihuta, dan Mandailing), Jawa Timur (Besuki), dan Sulawesi Selatan (Toraja). Produksi puncak tanaman kopi dalam era sebelum Perang Dunia II terjadi di antara tahun 1935-1940 dengan produksi sebesar 124.600 ton. Pertumbuhan kopi varietas *Robusta* ini segera melampaui jenis *Arabika* sehingga pada saat ini mewujudkan 90 persen dari produksi yang ada.

Masa-masa Perang Dunia II ketika Indonesia diduduki Jepang dan masa pasca Perang Dunia II pada saat Revolusi Kemerdekaan merupakan masa-masa suram bagi produksi kopi. Banyak *koffie onderneming* yang hancur sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari peperangan tadi serta adanya kecenderungan petani beralih ke tanaman produksi untuk subsistensi telah mengakibatkan turunnya produksi kopi secara drastis yang pada tahun 1950-an hanya mencapai 12-13% dari puncak produksi sebelum perang. Hal ini mengakibatkan hilangnya pasaran kopi Indonesia di pasaran internasional. Apa yang dikemukakan di atas tidak dapat dilepaskan dari moralitas petani, yang menekankan pada ekonomi *survival* dan wawasan

² *Handel Statistik Java 1928-1975*, hlm 39-40, Tabel 10-11

mendahulukan keselamatan (*safety-first philosophy*). Kalau menurunnya harga kopi di pasaran internasional cenderung mendapatkan reaksi dari perkebunan kopi berupa penurunan jumlah kopi yang dipetik dan mengurangi lahan usaha, maka reaksi petani kopi terhadap penurunan harga kopi tadi justru berwujud meningkatkan jumlah kopi yang dipetik untuk dapat mempertahankan derajat kehidupan subsistensi atau *survival* tadi.

Kopi Gayo, Meretas Kejayaan Setelah Konflik

Dengan mengesampingkan predikat penjajah, maka apresiasi mendalam harus diberikan pada pemerintahan kolonial Belanda yang melihat Tanah Gayo (ketinggian 1.000 - 1.700 m di atas permukaan laut) cocok untuk ditanami kopi. Bahkan dulu selain kopi juga diperkenalkan tanaman teh. Sayangnya sebagian besar sudah berubah menjadi perkebunan kopi. Belanda telah memperkenalkan dan membuka perkebunan kopi pertama seluas 100 ha pada tahun 1918 di kawasan Belang Gele, yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah. Pada tahun 1920 muncul kampung baru masyarakat Gayo di sekitar perkebunan kopi Belanda itu dan pada tahun 1925-1930 mereka membuka sejarah baru dengan munculnya kebun-kebun kopi rakyat sebagai buah pengetahuan bertetangga dengan perkebunan Belanda tadi. Pada akhir tahun 1930 empat buah kampung telah berdiri di sekitar kebun Belanda di Belang Gele itu, yaitu Kampung Belang Gele, Atu Gajah, Paya Sawi, dan Pantan Peseng.³

Baru pada paruh kedua tahun 1950-an orang Gayo seperti demam kebun kopi setelah lepas dari gangguan keamanan akibat pergolakan DI/TII yang menyebabkan keadaan ekonomi rakyat morat-marit. Pada periode itu hutan-hutan yang baik untuk

³ M. Junus Melalatoa, *Gayo, Etnografi Budaya Malu*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003. Hlm. 51

ditanam kopi dibabat habis oleh para petani kopi. Pada

Tahun 1972 Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebagai penghasil kopi terbesar dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (sekarang menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Luas areal kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 1972 adalah 17.180 ha. Akan tetapi dari hasil penelitian lapangan oleh Soegyarti Mangkuatmodjo tentang taraf hidup petani kopi di daerah ini pada tahun 1973 telah menyimpulkan bahwa dari segi pendapatan dan pengeluaran taraf hidup petani kopi Kabupaten Aceh Tengah tergolong rendah. Beberapa kemungkinan faktor penyebab di antaranya adalah para petani sering kali terkesima dengan pengalamarr harga kopi yang tinggi sehingga bersifat konsumtif dan lupa menabung. Kemudian mereka mungkin sadar kembali dan mulai mengatasi kesulitan dengan menanam di sela-sela kebun kopi tanaman buah-buahan seperti jeruk yang merupakan tanaman terluas dibandingkan dengan (1.164 ha) buah-buahan lainnya (EPS Kab. Aceh Tengah, 2002:86). Akibatnya banyak kebun kopi yang telantar, tak terawat bahkan tak sempat dipanen karena situasi keamanan yang buruk di Aceh Tengah khususnya dan di Provinsi NAD umumnya.

Luas areal perkebunan kopi rakyat diperinci menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah tahun 1970-1975

| No | Kecamatan | 1970 (ha) | 1971 (ha) | 1972 (ha) | 1973 (ha) | 1974 (ha) | 1975 (ha) |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Takengon | 125 | 129 | 133 | 137 | 145 | 650 |
| 2 | Bebesan | 4.500 | 4.635 | 4.774 | 4.918 | 5.066 | 5.218 |
| 3 | Bukit | 4.000 | 4.120 | 4.244 | 4.372 | 4.503 | 4.638 |
| 4 | Bandar | 4.750 | 4.893 | 5.040 | 5.191 | 5.347 | 5.507 |
| 5 | Silih Nara | 3.500 | 3.605 | 3.713 | 3.825 | 3.940 | 4.058 |
| 6 | Timang Gajah | 1.500 | 1.595 | 2.058 | 2.610 | 2.688 | 2.768 |
| 7 | Linge | - | - | - | - | - | - |
| Total | | 18.375 | 18.927 | 19.912 | 21.053 | 21.687 | 22.839 |

Sumber: Nasir, 1976:3

Sementara itu untuk memperoleh hasil kopi yang baik adalah melalui proses penjemuran oleh sinar matahari yang cukup. Perkebunan kopi bagi warga Kabupaten Bener Meriah (pecahan dari Kabupaten Aceh Tengah) dan Kabupaten Aceh Tengah merupakan urat nadi perekonomian yang paling menonjol, selain perdagangan sayur mayur seperti kol/kubis, wortel, cabai, dan coklat. Sebagai komoditas ekspor, 27.953 keuarga di Aceh Tengah menggantungkan hidup mereka pada budi daya kopi dengan luas areal 37.555 ha. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan sedikitnya 6.440 ha lahan kopi telantar dan 5.037 keuarga kehilangan lapangan kerja. Dari tangan petani, buah kopi atau kopi basah dibeli Rp. 4.500 hingga 5.000 per bambu atau sekitar 1,2 Kg. Sebelumnya harga mencapai Rp. 6.000 per bambu. Kalau sudah menjadi biji kopi basah atau disebut gabah, dijual dengan harga Rp. 13.500 per bambu. Sebelumnya harga sempat mencapai Rp. 15.000 per bambu (Kompas, 26 Mei 2005). Kenaikan harga kopi dirasakan menggairahkan kembali kehidupan masyarakat dataran tinggi Gayo yang letaknya tersembunyi di balik puncak pegunungan Bukit Barisan. Terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami yang memrakporandakan pesisir Aceh, walaupun daerah Tanah Gayo sempat mengalami guncangan gempa, namun bencana itu tidak mempengaruhi perdagangan kopi.

Setelah konflik mereda dan ditandatangani perjanjian damai RI-GAM pada akhir tahun 2005, para petani kopi kini mulai berani bercocok tanam di kebun kopi yang terletak jauh di lereng gunung, tidak sekedar menanam kopi di pekarangan rumah. Harga jual kopi pun -meski dipengaruhi harga kopi dunia-relatif stabil dan terus menguat karena jalur perdagangan antara Takengon-Bireun-Lhoksemauwe-Medan dapat dilalui kendaraan angkut tanpa risiko besar.

Deni Sutrisna, SS adalah Staf Peneliti pada Balai Arkeologi Medan

Harapan

Komoditas kopi merupakan sokoguru perkebunan di daerah Tanah Gayo, Kabupaten Aceh Tengah sejak masa kolonial Belanda. Kopi bukan sekedar dikonsumsi di lokal Aceh, tetapi kini sudah menjadi komoditas ekspor. Sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM akhir tahun 2005 aktivitas perkebunan terutama kebun kopi mulai bangkit kembali. Bila kita mengunjungi tanah Gayo, berikut Kota Takengon dan Danau Laut Tawar-nya, maka kedai (kafe) kopi mulai semarak, menandakan aktivitas perdagangan kopi telah "bangun dari tidurnya". Secerach harapan ke depan kian nyata mengingat rencana strategis Kabupaten tersebut untuk bergabung bersama 4 kabupaten lainnya yaitu, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Singkil membentuk provinsi baru yaitu Provinsi Aceh Leuser Antara/Provinsi ALA.

Alasan pembentukan provinsi ini adalah karena kelima wilayah tersebut tertinggal dibandingkan dengan wilayah pesisir dan akses yang terlalu jauh dengan pusat kekuasaan di Banda Aceh. Pemekaran, apapun alasannya semoga saja pemekaran itu bukan karena dipicu oleh phobia UU Otonomi Daerah yang nota bene kini telah banyak memunculkan provinsi-provinsi baru di Tanah Air. Yang lebih penting dari pemekaran tentunya adalah untuk peningkatan kesejahteraan hidup, khususnya kesejahteraan hidup petani di sektor perkebunan. Dan salah satunya perkebunan kopi yang sangat berperan dalam meningkatkan PAD, terutama perkebunan kopi di Kabupaten Aceh Tengah.

Baba Daud: Ulama Aceh Berasal Dari Turki

Oleh : Mehmet Ozay

Kata Pendahuluan

Aceh memiliki banyak ulama yang berjasa dalam penyebaran agama Islam dan menjadi pusat ilmu pengetahuan. Sebagian besar ulama yang membawa dan mengembangkan ajaran Islam di Aceh datang dari negara-negara timur tengah. Di antara para ulama tersebut, dikenal pula nama Baba Daud yang menurut beberapa referensi merupakan seorang ulama Aceh yang berasal dari Turki.

Meskipun sumber-sumber mengenai kelahiran dan kematiannya belum bisa diperoleh, kenyataan bahwa Baba Daud hidup antara pertengahan kedua abad ke-17 dan dekade pertama abad ke-18 adalah suatu hal yang sering dibicarakan. Nama asli Baba Daud yang lebih banyak dikenal dengan panggilan Baba Rumi adalah Baba Daud Bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali Ar-Rumi". Salah seorang leluhurnya dipercayai telah sampai ke Aceh. Dan diyakini juga bahwa ibunya berasal dari Melayu berdasarkan sandaran pada nama Baba Daud, yaitu al-Jawi.

Jika kita ambil sebagai pertimbangan, Gurunya, Syeikh Abdurrauf As-Singkili hidup antara tahun 1615-1693 dan kembali ke Aceh setelah menyempurnakan

pendidikannya di Arab pada tahun 1661¹, maka besar kemungkinan bahwa Baba Daud hidup pada pertengahan kedua abad ke-17 dan permulaan abad ke-18.

Dalam halaman pengenalan Tafsir Baizawi disebutkan bahwa Baba Daud bernama lengkap Baba Daud Bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali Ar-Rumi.² Referensi lainnya menyebutkan tentang keberadaan beliau sebagai murid seorang ulama terkenal, Syeikh Abdurrauf As-Singkili bernama Manzarul Ajla Martabatil A'la yang ditulis oleh Syeikh Faqih Jalaluddin, salah seorang murid dari Baba Daud sendiri.³

Mengenai keberadaan Baba Daud di Aceh, ada beberapa pendapat yang berbeda. Azra menyebutkan bahwa Baba Daud merupakan salah seorang tentara yang dikirim oleh pemerintahan Turki untuk melawan Portugis.⁴ Berkenaan dengan hal ini, Abdullah Shagir, seorang tokoh Melayu modern, mengkritik ide tersebut dan menyajikan beberapa alternatif. Salah satunya adalah suatu kemungkinan bahwa Syeikh Ismail Ar-Rumi, seorang pemimpin tariqat Qadiriyyah, yang dikirim dari Turki ke Aceh adalah ayah dari Baba Daud.⁵

¹ Hadi, Amirul, *Islam and State In Sumatra: A Study of Seventeenth Century Aceh*, Brill, 2004, hlm. 158

² Hamka, "Sebab Aceh Serambi Mekkah", *Seminar Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Aceh Dan Nusantara*, s. 4; Abdullah, Shagir, *Khazanah Karya*, Jilid 1, 1991, hlm. 160.

³ Abdullah, Shagir, *Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*, Cilt 5, Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyah Kuala Lumpur, 1999, hlm. 24.

⁴ Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama -Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Penerbit Mizan, Bandung, 1998, hlm. 211.

⁵ Ali Hasjmy menyebut nama lengkap Baba Daud dengan menambahkan Ali sebagai pengganti dari Al-Jawi sebagaimana yang tertulis berikut, "Syeikh Daud Bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali Ar-Rumi". Lihat: Hasjmy, Ali, *59 Tahun Aceh Merdeka*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 117. Sedangkan versi yang diberikan oleh Azyumardi Azra adalah "Daud Al-Jawi Al-Fansuri bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali Al-Rumi". Lihat juga Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama -Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Penerbit: Mizan, Cetakan Pertama, 1994, hlm. 211.

Syeikh Baba Daud juga dikenal dengan panggilan Teungku Chik Di Leupu. Panggilan ini diberikan kepada Baba Daud karena ia adalah seorang pendidik di sebuah Dayah yang didirikan oleh Syeikh Abdurrauf As-Singkili dan Baba Daud sendiri di Leupu, kecamatan Banda Aceh. Syeikh Abdurrauf As-Singkili meminta Baba Daud untuk memimpin dayah tersebut. Baba Daud diakui sebagai murid Abdurrauf As-Singkili yang terkemuka baik dikarnakan partisipasinya dalam mendirikan dayah di Leupu juga karena kontribusinya dalam menterjemahkan tafsir Baizawi.⁶

Selain itu, Syeikh Abdurrauf As-Singkili memberikan al-Quran yang ditulisnya dengan gaya kaligrafi istimewa untuk Baba Daud. Baba Daud kemudian memberikannya kepada Haji Yahya, generasi pemimpin dayah selanjutnya. Al-Quran tersebut dipegang dari generasi ke generasi. Dan Akhir-akhir ini, dikatakan bahwa tulisan tersebut berada ditangan Teungku Abdul Aziz Ujong yang menetap di Peunayong. Sesuai dengan pernyataan Ali Hasjmy bahwa ia pernah melihat langsung tulisan Syeikh Abdurrauf itu sendiri.⁷ Drs. Mahmud Ika, salah seorang keturunan Syeikh Abdurrauf As-Singkili mengatakan bahwa ia memiliki satu fotokopinya dan ia juga menunjukkannya ketika penulis menemuinya.

Baba Daud Digelar Sebagai Ar-Rumi

Pertama-tama, terlebih dahulu kita memberikan penjelasan tentang asal kata Rum. Kota Anatolia yang saat ini dikenal sebagai wilayah utama Turki, merupakan kawasan yang berada dibawah hegemoni kekaisaran Bizantium yang juga disebut Kekaisaran Timur Roma pada masa lalu.

⁶ Abdullah, Shagir, *Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*, hlm. 24-5.

⁷ Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama -Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, hlm. 211.

⁸ Hasjmy, Ali, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Penerbit Beuna, Jakarta, 1983, hlm. 218.

Masyarakat yang menduduki teritorial anatolia saat itu, di panggil sebagai orang Rum Sebelum pusat negara Saljuki dan Turki Usmani dapat menguasai wilayah ini. Oleh sebab itulah, mengapa Anatolia telah jauh dikenal sebagai daratan Rum. Disisi lain, Sumber-sumber Arab dan Persia memakai nama Rum untuk kekaisaran Bizantium dan Roma.⁸

Setelah Bangsa Turki Saljuki berhasil merobohkan Anatolia pada permulaan abad ke-13, bangsa Turki mendiami Anatolia dan kemudian masyarakat yang hidup disekitar wilayah ini mulai memanggil mereka dengan gelar Rum.⁹

Setelah Fatih Sultan Mehmed II (sang penakluk) berhasil menguasai Konstantinopel*, nama Rum mulai dipakai untuk golongan Turki. Oleh karena itu, telah menjadi suatu kebiasaan umum bangsa Turki dipanggil sebagai bangsa Rum, terutama mereka yang tinggal dikawasan Anatolia, tepatnya saat Turki Usmani berada pada puncak kekuasaan bagi seluruh dunia pada pertengahan kedua abad ke-15. kekuatan politik, ekonomi, dan budaya Turki Usmani juga mempengaruhi negara-negara Islam di dunia Melayu dan nusantara. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Melayu memanggil Sultan Turki Usmani sebagai 'Raja Rum' dikarnakan keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel.¹⁰

⁸ Reid, Anthony, *An Indonesian Frontier - Acehnese and Other Histories of Sumatra-*, Singapore University Press, Singapore, 2005, s. 69.

⁹ Mersinli, Cemal, 'Roma-Rum Kelimeleri', *TTK Belleten*, V. Cilt, hlm. 17-18, April, 1941, Ankara, (Türkiye), hlm. 160.

* Nama Konstantinopel diberikan sebagai nama kota karena kaisar Bizantium yang berkuasa saat itu bernama Konstantin. Nama ini merupakan nama lama kota Istanbul. Bahkan selama masa kerajaan Turki Usmani, nama ini juga dipakai oleh orang-orang Turki. Kemudian nama tersebut diubah menjadi Istanbul. Pemakaian nama Konstantinopel dapat ditemui dalam beberapa buku atau teks yang ditulis pada abad ke- 19 juga.

¹⁰ Azra, Azyumardi, *The Transmission of Islamic Reformism To Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian 'Ulama' In The Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Dissertation in the School of Arts

Baba Daud: Seorang Ulama dan Tulisannya

Baba Daud merupakan salah seorang murid dan khalifah Syeikh Abdurrauf As-Singkili yang diakui sebagai tokoh agama terkemuka dalam kehidupan sejarah Aceh. Kepentingan Baba Daud sebagai seorang Ulama besar dapat dilihat dari kontribusinya dalam mendirikan Dayah Manyang Leupe bersama-sama dengan Gurunya.¹³ Disamping itu, Baba Daud juga mencurahkan jasanya dalam penulisan tafsir alquran dan tafsir Melayu pertama yang dipakai oleh As-Singkili sebagai referensi utama penulisan Tafsir Bayzawi. Buku tersebut berjudul Turjumanul al-Mustafid yang telah berperan penting dalam peningkatan pemikiran Islam didunia Melayu. Aspek menarik lainnya hadala tafsir ini pertama kali diterbitkan di Istanbul.¹⁴

Cetakan asli tulisannya dapat ditemukan pada salah seorang cucu Baba Daud yang berkediaman di Patani yang kemudian dipindahkan kepada Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Patani. Karya tulis ini telah diterbitkan berkat bantuan Syeikh Ahmad Al-Patani. Berdasarkan penuturan keturunan-keturunan Baba Daud bahwa ada beberapa karya lainnya yang dikarang oleh Baba Daud sendiri. Akan tetapi hingga kini belum ada data-data konkrit yang dapat ditemukan. Karya tulisan tangan Baba Daud tersebut disalin kembali oleh Syeikh Daud bin Ismail Al-Patani, salah seorang keturunannya yang juga dikenal sebagai Tok Daud Khatib. Tulisan tersebut diwasiatkan kepada sepupunya, Syeikh Ahmad Al-Patani yang kemudian ditulis kembali oleh Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Patani, Syeikh Daud bin Ismail Al-Patani dan Syeikh Idris bin Husein Kelantan. Edisi pertama

¹³ Hasjmy, Ali, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Penerbit Beuna, Cakarta, 1983, hlm. 382.

¹⁴ Abdullah, Sagir, *Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*, hlm. 16; Amiruddin, M. Hasbi, *The Response of the Ulama Dayah -to the Modernization of Islamic Law in Aceh-*, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2005, hlm. 13.

Sebagai hubungan antara Kesultanan Turki Usmani dan Kesultanan Aceh Darussalam, bangsa Turki lebih banyak datang mengunjungi Aceh dan mereka juga dipanggil dengan panggilan yang sama, tidak hanya oleh orang-orang Aceh sendiri tapi juga oleh penduduk di dunia Melayu. Azyumardi Azra mengatakan bahwa Raja Rum biasanya disebut-sebut dalam manuskrip Melayu sebagaimana yang tertulis berikut ini: "ada narrasi istimewa yang ditransmisikan dari generasi ke generasi tentang kesultanan Rum dalam dunia Melayu. Pada masa dahulu, bangsa Arab dan Persia memiliki peran penting dalam hal penyebaran islam diwilayah ini. Bagaimanapun, tidak ditemukan informasi detail yang menyatakan Turki juga ikut ambil andil dalam periode islamisasi pada masa-masa awal.¹¹ (tanda petiknya berakhir dimana?)

Berdasarkan hasil penelitian kita bahwa alasan Baba Daud di sebut Ar-Rum karena leluhurnya berasal dari Anatolia, Turki.

Argumen lain yang mendukung pendapat ini adalah Emperium, sebuah desa yang terletak di pusat kota Banda Aceh. Alasan pemberian nama ini diketahui Sejak adanya pengunjung pertama yang berasal dari wilayah Turki pada abad ke-16. kata Emperium terdiri dari dua kata: 'empe' dan 'rium'. 'Empe' berarti sebuah penghormatan. Sedangkan 'Rium', sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dipakai untuk sekelompok orang yang datang dari Anatolia. Maka, kata 'Emperium' mulai dipakai oleh masyarakat Aceh untuk mengekspresikan penghormatan mereka pada komunitas Turki di Aceh.¹²

and Sciences Columbia University, 1992, hlm. 103; Göksoy, İ. Hakki, *Güneydoğu Asya'da Osmanlı-Türk Tesirleri*, Fakülte Kitabevi, Isparta, (Türkiye), 2004, hlm. 11.

¹¹ Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama -Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, hlm. 45.

¹² Özay, Mehmet, *Açe Kitabı*, Fide Yayınları, Istanbul, 2006, hlm. 111.

diterbitkan di Istanbul, Mekkah, dan Mesir. Ketiga pemuka agama tersebut juga melakukan beberapa koreksi pada karya tulis asli Baba Daud.¹⁵

Baba Daud, tak hanya mengkontribusikan hasil karya tulis gurunya, Syeikh Abdurrauf As-Singkili tapi juga menulis hasil karyanya sendiri. Salah satu tulisannya yang terkemuka adalah *Risala Masailal li Ikhwanil Muhtadi* yang telah dijadikan sebagai buku pedoman utama tak hanya di Aceh¹⁶ tapi juga di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailan dimana semua negara ini dulunya saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu selama kurun waktu 300 tahun terakhir.¹⁷ Buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawi dan tehnik tanya-jawab ini telah diakui sebagai salah satu cara terbaik untuk mengajarkan pengetahuan agama dasar bagi murid-murid yang tidak mengenal bahasa Arab. Buku ini juga menampilkan beberapa mata pendidikan yang berlainan seperti Akidah, Ibadah, dan lain sebagainya tanpa ada perubahan sedikitpun.¹⁸ Disamping itu pula, ajaran-ajaran dalam tulisan Baba Daud ini telah pernah pula melingkari kegiatan kegamaan di Masailal Muhtadin telah berperan banyak dalam pembentukan karakter keagamaan murid-murid di wilayah tersebut.

Sepanjang karirnya, Baba Daud juga dikenal sebagai seorang guru dan banyak orang-orang penting yang memilih untuk menjadi muridnya. Salah satunya adalah Nayan Baghdadi, anak dari Al-Firus al-Baghdadi, pendiri Dayah Tanoh Abee.¹⁹

¹⁵ Abdullah, Sagir, *Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*, Cilt 5, Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyah Kuala Lumpur, 1999, hlm. 16.

¹⁶ Hasjmy, Ali, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 81.

¹⁷ Hasjmy, Ali, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Penerbit Beuna, Cakarta, 1983, hlm. 218.

¹⁸ Hasjmy, Ali, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, s. 382; Amiruddin, M. Hasbi, *The Response of the Ulama Dayah -to the Modernization of Islamic Law in Aceh-*, hlm. 39.

Nayan Firus al-Baghdadi menjalani satu fase pendidikannya di Dayah Leupu Peunayong, sebuah dayah terkemuka di Aceh saat itu dan Baba Daud yang bergelar sebagai Teungku Chik di Leupu adalah salah satu guru pengajarnya. Setelah menyempurnakan pendidikannya disini, Baba Daud menganjurkannya untuk kembali ke Seulimeum dan mendirikan sebuah pusat kegiatan pendidikan disana.²⁰ Selain Nayan Firus al-Baghdadi, Syeikh Faqih Jalaluddin juga tercatat sebagai salah seorang murid Baba Daud lainnya yang populer.²¹

Keturunannya

Tidak Diketahui apakah ada atau tidak keturunan Baba Daud yang masih hidup di Aceh saat ini. Bagaimanapun, seorang pemuka agama yang terkenal, Syeikh Daud bin Ismail al-Jawi al-Patani yang menetap di Patani, bagian selatan Thailan, diperkirakan sebagai salah seorang keturunannya. Haji Nik Wan Fatma binti Haji Wan Abdul Kadir Kelantan bin Syeikh Daud bin Ismail al-Patani (Kak Mah) yang disebut-sebut sebagai keturunannya yang lain telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Senin, 26 Juli 1999, di Kota Baru Kelantan.²²

Makam Baba Daud

Saya mendapat informasi awal mengenai Baba Daud ketika datang pertama kali ke Aceh antara September hingga Desember, tahun 2005 dan menetap di sana selama 3 bulan. Salah seorang teman membimbing saya untuk melihat makam

¹⁹ Hj. Wan Mohammad Shaghir Abdullah, *Penyebaran Islam dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*, Cilt 7, Siri Ke-8, Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, 1999, hlm. 2.

²⁰ Hasjmy, Ali, *Ulama Aceh*, Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa 1997, hlm. 4.

²¹ Abdullah, Shagir, *Penyebaran Islam&Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*, Jilid 6, hlm. 41.

²² Abdullah, Shagir, *Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu*, Jilid 5, hlm. 26-7.

seorang ulama bernama Baba Daud. Makam tersebut terletak berdekatan dengan lokasi Mesjid di Leupu, Peunayong (nama wilayah sebenarnya). Karena tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang hebat diterjang tsunami, kondisi makam tersebut juga menjadi tak layak. Disekeliling makam ini, terdapat beberapa fasilitas kontruksi yang dibangun oleh LSM-LSM asing.

Meskipun begitu, lingkungan masyarakat dengan inisiatifnya sendiri memutuskan untuk meletakkan pagar disekeliling makam tersebut dengan polesan tulisan, "Makam Ulama Aceh. Anak Murid Tgk. Syiah Kuala." Agak jauh dari makam tersebut terdapat sebuah toko pertukangan kayu. Tampaknya kita masih dapat mengenal makam Baba Daud berkat kontribusi sebagian orang yang Belum melupakan jasa-jasanya dimasa-masa yang lalu.

Mehmet Ozay, Ph.D adalah Dosen Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Harimau, Gajah, Banjir, dan Keseimbangan Alam di Aceh

Oleh : Titit Lestari

Harimau, Gajah, dan Banjir

M Nasir (50) warga Desa Drinjalo, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Minggu (7/10/2007) tewas diterkam harimau dikebun pala miliknya di Gunung Meukek.....¹

Sejumlah petani di kawasan Kecamatan Labuhan Haji Timur dan Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), telah memasang puluhan puluhan Perangkap Harimau Pemangsa...²

MELUASNYA keganasan harimau di kawasan Aceh Selatan, menyebabkan merebaknya isu mengganasnya rimueng daya di daerah tetangganya di Kabupaten Aceh Barat Daya...³

Kawanan gajah liar yang berjumlah delapan ekor itu selama sebulan terakhir terus mengobrak-abrik tanaman perkebunan dan pertanian milik masyarakat Desa Cot Puntikrueng Ayon, Ranto Sabun dan Ie Jeureungeh, sekitar 120 KM sebelah barat kota Banda Aceh.⁴

Rahmatullah, salah seorang warga transmigran Sp-IV Patek kepada ANTARA News di Banda Aceh, Selasa, mengatakan, bahwa kawanan gajah liar itu mulai turun dan mengobrak-abrik tanaman perkebunan rakyat sekitar sepekan menjelang lebaran Idul Fitri 2007.⁵

¹ www.antara.co.id/arc/2007/10/7/

² www.antara.co.id/arc/2007/10/16

³ jakacjr.wordpress.com/2007/08/29/

⁴ http://www.kapanlagi.com, Kamis, 23 Agustus 2007 11:00

⁵ http://www.antara.co.id/arc/2007/10/16

Banjir juga dilaporkan melanda Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, dan Aceh Selatan sejak tiga hari terakhir. Di Aceh Barat daya dua orang warga dinyatakan hilang diseret arus. Ratusan jiwa lainnya terpaksa mengungsi ke tempat-tempat yang aman.⁶

Kabupaten Aceh Singkil dan Pemko Subulussalam secara umum kembali normal setelah sepekan direndam banjir. Namun bencana alam itu menyisakan kerugian bagi petani karena ratusan hektare tanaman padi dan palawija rusak dan puso.⁷

Beberapa cuplikan berita di atas menggambarkan betapa bencana di Aceh terus menerus tanpa henti. Setelah bencana dahsyat tsunami melanda Aceh seolah-olah bencana alam terus menerus menyertai rakyat Aceh. Muncul pertanyaan di benak kita Apa dosa rakyat kita? Apa yang sedang terjadi dengan bumi ini, sepertinya bumi murka terhadap manusia.

Si raja Hutan dan Gajah liar mulai ekspansi menuju kawasan permukiman penduduk. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harimau tersebut mulai mengusik manusia. Siapa sebetulnya yang salah? Manusia atau harimau. Ada dua pendapat yang dapat menjawab pertanyaan ini Yang pertama orang yang berpandangan antroposentris akan berpendapat bahwa hewan-hewan tersebut yang harusnya di halau dan disingkirkan karena dia telah mengganggu kehidupan manusia. Sementara pendapat lainnya dari golongan ecosentris yang menganggap bahwa hal tersebut adalah kesalahan manusia yang telah mengganggu habitat hewan.

⁶http://www.okezone.com

⁷ Harian Analisa, edisi 16 Oktober 2007

Pemanasan Global

Perubahan iklim saat ini bukan lagi wacana yang mengada-ada, namun sudah menjadi momok yang menakutkan bagi warga bumi. Tengoklah beberapa kejadian alam di berbagai belahan bumi seperti naiknya permukaan air laut dan kondisi cuaca yang tak menentu serta suhu udara makin meningkat. Tak pelak peringatan hari lingkungan hidup se-dunia mengumandangkan isu ini.

Sebenarnya pemanasan bumi hal yang biasa. Sejarah planet bumi menghangat dan mendingin berkali-kali selama 4,65 milyar tahun. Seperti apa proses terjadinya? Bumi yang kita huni ini memiliki lapisan atmosfer yang melindunginya dari dampak radiasi sinar matahari. Setiap hari, panas matahari masuk ke bumi menembus lapisan atmosfer, berupa radiasi gelombang pendek. Sebagian diserap bumi, dan sisanya dipantulkan lagi ke angkasan sebagai gelombang panjang. Pada lapisan atmosfer bumi itu, terdapat selimut gas yang biasa dikenal dengan Gas Rumah Kaca. (GRK). Gas Rumah Kaca ini yang berfungsi menahan panas matahari agar tidak dilepas kembali seluruhnya keangkasan, sehingga bumi tetap hangat.

Selama bumi masih dalam temperatur yang "nyaman" bagi hewan, tumbuhan dan manusia untuk bertahan hidup, yaitu 60-F/16-C, pemanasan bumi adalah hal yang baik. Namun hal tersebut akan menjadi masalah, jika terjadi peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca yang melebihi dari batas normal. Berdasarkan hasil pengamatan para ahli menunjukkan bahwa dalam satu abad terakhir ini telah terjadi peningkatan suhu secara global atau yang dikenal Global Warming. "Peningkatan ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca sehingga suhu udara di bumi meningkat, yang dikenal dengan nama Pemanasan Global serta terjadinya pola perubahan iklim

Teori Gaia mengatakan, Bumi memiliki semacam sistem kontrol penyeimbang planet yang memungkinkannya memiliki lingkungan yang sesuai bagi kehidupan. Teori homeostatis Bumi yang

dikemukakan ilmuwan James Lovelock diterima secara luas sejak tiga dasawarsa silam.⁸ Tetapi apa yang terjadi di bumi kita saat ini dengan adanya perubahan iklim yang semakin tidak terduga? Keseimbangan bumi telah "ternodai", artinya bahwa bahwa umat manusia di bumi ini telah memerkosakan lingkungan hidupnya sehingga mengakibatkan mekanisme kontrol penyeimbang planet kini justru bergerak melawan diri manusia sendiri yang mengakibatkan kehidupan di bumi menjadi tak seperti dulu lagi (dalam kondisi bumi seimbang) dan perubahan iklim yang berakibat pada pemanasan global menjadi sesuatu menjadi sebuah momok bagi manusia penghuni bumi.

Beberapa waktu lalu para pemimpin dunia disibukkan dengan masalah penting yang menyangkut kehidupan manusia di bumi yaitu isu "pemanasan global" (global warming). Para petinggi dunia sibuk mengurus pemanasan global, sedangkan masyarakat kita saat ini masih disibukkan dengan harimau yang makan orang yang terjadi di beberapa kota di Aceh (Peuleulak dan Aceh Selatan) yang memakan korban baik meninggal maupun luka-luka dan juga adanya kawanan gajah yang juga telah "menduduki" beberapa permukiman di Aceh. Belum selesai masalah harimau dan gajah ini kita disibukkan kembali dengan adanya banjir yang juga melanda beberapa daerah di kabupaten Aceh Utara, Abuya, Nagan, dan Aceh Selatan. Melihat kondisi yang saat ini terjadi muncul pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi dengan bumi ini? Apakah benar bahwa beberapa orang mengatakan bahwa bumi kita sudah tua?

Jika kita menyikapi pandangan orang bahwa bumi kita telah tua hal itu kurangnya tepat. Apakah bumi sama seperti kita bahwa jika dia sudah tua maka kemampuan mereka secara fisik juga berkurang? Bumi tidaklah sama dengan kita. Manusia boleh tua dengan semakin bertambahnya umur, tetapi bumi akan dapat

⁸ Nusya Kuswantin, Upaya Merespons Pemanasan Global, Kompas Jumat, 14 September 2007

membuat wajahnya selalu muda jika diperlakukan dengan baik. Sebagai salah satu contoh apa yang telah menyebabkan banjir di beberapa daerah di NAD terjadi dan mengapa hewan-hewan juga mulai memangsa manusia? Kemungkinan yang terjadi adalah bahwa manusia sebagai agen perubahan telah mengacaukan keadaan bumi menuju sebuah tahapan yang dikatakan tidak seimbang. Segala sesuatu yang dilakukan secara seimbang akan dapat menghasilkan keselarasan hidup yang harmonis. Manusia hidup di bumi telah mengabaikan keseimbangan yang harusnya tetap dijaga. Sebagai salah satu daerah yang berada di negara yang berkembang, angka kematian dan angka kelahiran yang ada di NAD menunjukkan bahwa lebih banyak kelahiran dibanding kematian. Alhasil dengan kondisi ini tekanan penduduk terhadap lahan juga semakin besar. Tekanan penduduk terhadap lahan tidak hanya sebatas pada kebutuhan lahan untuk usaha pertanian tetapi juga untuk permukiman. Yang menjadi pertanyaannya apakah yang harus kita perbuat untuk memperlambat dan memperbaiki kondisi bumi yang semakin "menyerang manusia".

Hutan sebagai salah satu kekayaan bumi merupakan komponen penting bagi keseimbangan ekosistem di bumi ini. Mengapa pemanasan global bias terjadi? Pemanasan global terjadi akibat tidak adanya keseimbangan ekologis di bumi akibat ulah manusia menebang hutan alam tanpa menanamnya kembali. Akibatnya adalah meningkatnya gas buangan (misalnya CO₂, Metan, dan CFC) yang menyebabkan efek rumah kaca yang menjebak panas di bumi dan merusak lapisan ozon sehingga iklim menjadi tak terkendali. Akibat perubahan iklim menjadikan petani juga bingung karena waktu musim juga bergeser.

Keseimbangan Alam Aceh

Hidup bersama alam dewasa ini hanya sekadar gaya hidup. Bukan cara hidup. Ketika kemudian kita dihadapkan pada bencana lingkungan, tanah longsor, banjir, gunung meletus, tiba-tiba tema di atas muncul kembali. Sayangnya, semakin sering

disuarakan semakin kosong pula maknanya dalam realitas kehidupan. Hidup bersama alam sekarang ini hanya menjadi eksotika komoditas wisata. Padahal, esensi yang dimaksudkan dalam kehidupan modern sekarang ini bahwa manusia adalah bagian dari alam yang saling menerima dan memberi (secara riil) supaya membentuk harmoni hingga bisa saling menjaga. Benarkah antara manusia dan alam bisa saling menerima dan memberi secara riil? Lantas bagaimana cara kerja take-give manusia dengan alam?

Banyaknya bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Nanggroe Aceh Darussalam terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi manusia. Bukannya saya mengesampingkan teori-teori di atas tersebut, tapi saya ingin menunjukkan penyebab lain dari musibah yang dapat kita semua ambil hikmahnya, dan berhenti menyalahkan Tuhan atas peristiwa itu. Jawabannya lagi-lagi adalah ada pada diri manusia. Kerusakan lingkungan disebabkan terutama oleh aktivitas manusia yang egois yang mengabaikan lingkungan.

Pasca tsunami pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi keperluan akan kayu semakin mendesak. Darimana pemenuhan kayu tersebut akan diperoleh? Perlu perhatian khusus karena untuk proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang nantinya akan mengambil kayu dari hutan Aceh akan dapat meluluhlantakkan sumberdaya alam yang kita miliki sama dahsyatnya dengan tsunami yang melanda Aceh.

Kerusakan hutan tidak terkendali lagi, dengan alasan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan menjadi penyebab bencana yang nantinya akan timbul. Wacana pemberian izin 5 HPH beroperasi di Aceh oleh Menhut RI telah menuai banyak protes dari kalangan aktivis lingkungan hidup dengan alasan bahwa pembukaan HPH dengan alasan untuk mengcover kebutuhan kayu untuk pembangunan Aceh sama halnya dengan menyusun kekuatan untuk membuat "tsunami darat" berikutnya. Berdasarkan data dari pemetaan satelit, luas hutan di Aceh saat ini mencapai sekitar 3,265 juta hektar (ha),

terdiri dari 1,8 juta hektar (ha) hutan lindung, 825 hutan konservasi, dan 640 ha hutan produksi. Dan 11 pengusaha yang mendapat izin HPH itu mempunyai jatah tebang sebesar 500.000 meter kubik untuk tahun 2006, jadi itu berarti sebagian dari hutan Aceh akan gundul jika izin tersebut benar-benar dilaksanakan.⁹

Dengan dalih untuk mengover kerusakan bencana dan dengan alasan kemanusiaan untuk membangun Aceh dari kerusakan maha dahsyat maka alam Aceh telah dieksploitasi sedemikian rupa untuk menutupi kebutuhan pembangunan di Aceh. Manusia harusnya tidak hanya mementingkan dirinya secara langsung tetapi juga perlu mengkaji lebih dalam tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam yang harmonis sebagai salah satu cara untuk terhindar dari bencana.

Salah satu teori yang mengkritik eksploitasi manusia terhadap alamnya adalah pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Eckersley, Goodin dan Dobson (Matthew Patterson, 2001) yang disebut sebagai kelompok Green Politics.¹⁰ Pada dasarnya pemikiran ini adalah menekankan pada pentingnya suatu paham serta upaya yang berlandaskan pada ecocentrism, yaitu suatu bentuk penolakan atas pandangan antropocentris atas dunia. Yang terpenting adalah keseimbangan antara alam dan manusia. Pada saat keseimbangan tadi tidak lagi bersifat seimbang, maka pada saat itulah kerusakan akan terjadi. Istilahnya adalah catastrophe, atau bencana.

Masyarakat Aceh pada dasarnya dalam mengelola alam pada masa dahulu selalu memperhatikan keseimbangan alam dengan adanya beberapa jabatan dalam masyarakat yang mengangkat seseorang untuk mengurus masalah hutan, sawah, dan sebagainya misalnya yang dikenal dengan istilah *pawang uteun*, dan *keujruen blang*. Tugas mereka tidak hanya sebatas pengelolaan hutan dan sawah secara teknis

⁹ Suara Pembaharuan Edisi 11 Desember 2005

¹⁰ <http://sekolahsekolah.blogspot.com>

tetapi mereka juga menerapkan pengelolaan alam tersebut dengan cara "magis". Artinya bahwa orang tersebut tidak mengesampingkan kekuatan supranatural dalam pengelolaan alam dengan cara membuat isu-isu lingkungan yang sulit diterima nalar tetapi masyarakat mematuhi. Sebagai salah satu contoh bahwa masyarakat dilarang menebang pohon di sempadan sungai karena roh halus di sungai akan mengganggu yang memotong pohon tersebut. Cara-cara ini pada masa dahulu sangat manjur untuk mengelola alam dari jorjoran tangan manusia yang tidak bertanggung jawab disamping itu para pengelola tersebut juga memiliki kharisma kepemimpinan tinggi yang membuat anggota masyarakat disekitarnya segan dan menuruti peraturan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana keberadaan pengelola sumberdaya alam tersebut sebagai salah satu langkah menuju keseimbangan alam? Di Aceh peran pengelola alam secara adat pada saat ini sangat kecil sekali walaupun ada mereka lebih berperan dalam pengelolaan secara teknis dan kewibawaan mereka tidak sebesar pada jaman dahulu. Jika kondisi ini terjadi apa yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan alam Aceh? Yang perlu dilakukan adalah gerakan massal untuk membatasi penggunaan bahan bangunan dari kayu.

Pada beberapa pembangunan rumah korban tsunami di Aceh sudah meminimalisir penggunaan kayu yang diganti dengan rangka baja sebagai pengganti kayu dan juga adanya rumah yang seluruh rangka rumahnya menggunakan aluminium. Langkah ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai langkah untuk mengurangi kerusakan hutan yang sedang berlangsung di Aceh.

Apa yang harus kita lakukan?

Jika anda pernah menonton film Amerika yang berjudul *The Day After Tomorrow* maka bencana dahyat yang secara reori dapat terjadi akibat pemanasan global maka saat ini kita sedang mulai menyusun

kekuatan bencana tersebut jika keseimbangan hidup dengan alam terus terabaikan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adapah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam agar bencana perubahan iklim global dapat diminimalisir?

Kementerian Negara Lingkungan Hidup saat pembukaan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia di Jakarta telah menghimbau semua pihak agar mengupayakan langkah "adaptasi" dan "mitigasi" terhadap lingkungan." Kegiatan adaptasi dilakukan untuk menekan dampak perubahan iklim baik secara antisipatif maupun reaktif.

Secara sederhana adaptasi lingkungan dilakukan dengan membiasakan diri menanam pohon dan hindari menebang pohon terutama di daerah berbukit agar tidak terjadi tanah longsor dan diharapkan keberadaan pohon tersebut bisa menyerap polusi udara untuk mengurangi penumpukan gas pada lapisan bumi, budayakan hidup bersih dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Cara selanjutnya upayakan membuat sumur resapan atau bak untuk menampung air hujan, serta menghindari daerah pemukiman di lereng bukit. Bagi pelaut, petani dan yang akan melakukan perjalanan jarak jauh, carilah informasi ramalan cuaca dan musim sebelum beraktifitas.

Sedangkan kegiatan mitigasi dilakukan sebagai salah satu upaya menurunkan efek gas rumah kaca sehingga dapat memperlambat laju pemanasan global. Yang bisa dilakukan untuk meredam laju kenaikan suhu bumi yaitu melalui pengembangan etika hemat energi dan ramah lingkungan.

Titit Lestari, S.Si adalah Asisten Peneliti Madya pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Upaya lainnya adalah penghematan pemakaian listrik konsumsi rumah tangga perlu terus diupayakan terutama bila pembangkit listriknya mempergunakan bahan bakar diesel/batu bara.

Saat belanja, pilih produk dengan kemasan minimal untuk mengurangi sampah, dan bawalah tas belanja sendiri agar meminimalkan penggunaan kantong plastik. Sebagai konsumen, kita harus kritis melakukan penolakan untuk mempergunakan barang konsumsi dan peralatan yang masih mempergunakan Klorofluorokarbon (CFC) dalam produknya karena saat kita memakainya tak ubahnya kita menyediakan tali untuk menjerat leher kita sendiri dimasa mendatang karena CFC merusak lapisan ozon. Bahan CFC banyak dijumpai pada peralatan pendingin (Kulkas, AC) serta tabung penyemprot parfum.

Menggiatkan pelestarian hutan dan reboisasi, karena keberadaan hutan ternyata berfungsi luar biasa dalam menyerap gas CO₂ sehingga dapat memperlambat penimbunan gas-gas rumah kaca.

Aceh yang saat ini masih memiliki hutan yang relative luas maka belumlah terlambat jika kita bersama-sama terus menjaga kelestarian hutan dan air untuk keselamatan dan warisan bagi anak cucu kita nanti. Dengan menjaga keseimbangan alam maka bencana banjir dan juga serangan dari hewan liar di hutan dapat terhindarkan dan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dapat hidup harmonis dengan alam

Melalui tulisan ini saya mengajak untuk melakukan gerakan moral untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan yang lebih dahsyat yang akan menyebabkan kehancuran bagi umat manusia. Sebelum semua terlambat "mari selamatkan bumi!"

Revitalisasi Kearifan Budaya mandailing Untuk Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis

Oleh : Zulkifli Lubis

Alam Mandailing Dalam Catatan Willem Iskander

Bagi kita yang pernah membaca buku *Sibulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk* karangan seorang tokoh pendidikan asal Mandailing dari abad ke-19, Willem Iskander (1840-1876), tak habis-habis kagum kita tentang kecintaan beliau terhadap "tanah air"-nya *tano-rura* Mandailing, yang tersurat indah dalam bait-bait puisinya. Simaklah salah satu puisinya yang berjudul MANDAILING yang mungkin ia tuliskan saat beristirahat di Adian Bania dalam perjalanan menuju Natal ketika akan berangkat studi ke Negeri Belanda pada 1857: "O Mandailing godang!/Tano inganan ku sorang/Na ni atir ni dolok na lampas/Na ni joling ni dolok na martimbus/Ipul na na laing bubus....Muda u tindo tingon Bania/U tatap ma aek ni Batanggadis/Mangelduk elduk dalam nia/Atir kamun jior mar baris".¹ Dalam bait-bait berikutnya ia juga tak menyembunyikan kegalauan hatinya melihat "keterbelakangan" anak negerinya, namun begitu, ia tak akan menyalahkan karena di sanalah pertama kali ia melihat matahari terbit. Ia mengucapkan selamat berpisah, entah berapa lama ia tak tahu, sembari berharap ketika bertemu kembali nanti anak negerinya tak lagi bodoh!

Hampir 150 tahun yang lalu Willem Iskander telah mengingatkan kita tentang banyak hal, bagaimana mencintai negeri, bagaimana mencintai alam, mencintai Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mendidik anak-anak untuk mencapai kemajuan. Ia juga tak sekedar memberi nasihat, melainkan bukti

¹ Terjemahan dari Basyral Hamidi Harahap (1976): "O Mandailing Raya/tanah tumpah darahku/ yang diapit gunung yang tinggi/ yang ditatap gunung berasap/asapnya mengepul terus! ... Jika kupandang dari Bania/Kulihat air Batang Gadis/mengalir berliku-liku/Kiri kanan juar berbaris".

nyata dengan mendirikan sekolah guru di Tano Bato (1862). Apa yang ia lakukan satu setengah abad yang lalu telah memberikan sumbangan sangat besar bagi kemajuan orang Mandailing khususnya, sehingga sejarah telah mencatat generasi di bawahnya yang sudah terdidik banyak menjadi pionir dalam berbagai bidang kehidupan di negeri ini.

Kalau Willem Iskander telah sedemikian rupa menggambarkan kecintaannya kepada alam Mandailing yang ia lukiskan sangat indah, diapit bukit dan gunung, subur disiram aliran sungai, maka pada hari ini patutlah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, khususnya sebagai warga Mandailing, apakah lingkungan alam dimana kita hidup dan menggantungkan kehidupan masih indah dan memberikan jaminan kehidupan bagi kita dan bagi anak cucu kita kelak? Tor Sihite, Tor Barerang, Dolok Sigantang, Dolok Malea, dan Bania, nama-nama yang pernah disebutkan Willem Iskander dalam puisinya semuanya masih tegak, sebagaimana Sorik Marapi masih mengepulkan asapnya dan Batang Gadis masih mengalirkan airnya. Tapi bagaimanakah nasib hutan, pohon-pohon, tumbuhan-obat, hewan-hewan, dan segala bentuk kehidupan yang ada di lingkungan alam pada semua bukit dan gunung yang ada di daerah Mandailing Natal? Bagaimana kualitas dan debit air sungai yang mengalir di sungai-sungai dan anak-anak sungai kita, apakah masih mampu menyangga kehidupan yang layak di masa yang akan datang? Kita bisa menjawabnya sendiri, dengan coba merefleksikan dan membuat bandingan keadaan hutan-hutan dan sungai-sungai kita, berikut dengan segala macam isinya dalam 5, 10, 15, atau 20 tahun terakhir; apakah masih bertahan atau justru sebaliknya sedang menuju kehancuran? Seandainya Willem Iskander hidup kembali hari ini, dan menyaksikan alam

sekelilingnya yang ia pernah saksikan 150 tahun lalu, mungkin ia akan menangis pilu!

Taman Nasional Batang Gadis : momentum mengukir sejarah

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lain beberapa tahun terakhir ini tidak lepas dari kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ulah manusia. Peristiwa banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sejenisnya telah berulang kali terjadi dan menjadi rekaman-rekaman peristiwa pilu yang terus menambah album dan arsip sejarah penderitaan akibat bencana. Bencana silih berganti terjadi, lembaran kisah pilu akibat bencana semakin menebal, tetapi sayangnya, ingatan kita yang teramat pendek membuat banyak di antara kita cepat lupa, semakin kebal dan bebal, sehingga tak lagi punya kemauan dan daya untuk melakukan refleksi, introspeksi, maupun aksi bersama untuk mencegah berulangnya bencana. Kerusakan lingkungan hidup akibat pembalakan hutan di Mandailing Natal beberapa tahun terakhir ini juga menyimpan potensi bencana yang sewaktu-waktu akan menggilas kehidupan kita. Apakah kita kembali mengikuti pola umum yang biasa berlaku, yaitu harus menunggu bencana itu datang dulu, baru berbuat sesuatu untuk mengatasinya?

Adanya inisiatif Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang telah didukung oleh pemerintah pusat maupun organisasi-organisasi non-pemerintah untuk membentuk Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) di atas areal seluas 108.000 ha, bisa menjadi momentum bagi kita, khususnya orang-orang Mandailing, untuk kembali mengukir sejarah kepeloporan. Dukungan dari berbagai pihak, NGO dan lembaga donor internasional, untuk mewujudkan sebuah taman nasional di Kabupaten Mandailing Natal, dilihat dari konteks budaya kita, sama sekali tak pantas jika tak disambut dan didukung pula. Kita selalu menjunjung budaya malu, yaitu malu kalau kita tak berpartisipasi (*patarida bohi*) dalam hal berbuat kebaikan dan kebajikan. TNBG adalah sebuah wujud kebajikan untuk

memelihara kelestarian lingkungan hidup, yang manfaatnya bukan saja untuk kita yang tinggal di daerah Mandailing Natal tetapi juga bagi kehidupan manusia sejadi. Karena itu, sesuai dengan budaya Mandailing dan ajaran agama Islam, kita pasti malu jika tak ikut mendukung sebuah usaha yang akan mencegah kita melakukan perusakan di muka bumi. Sepenggal cerita berjudul "*Sada Alak Pulon Ta on Na Mabiari di Ahaila*" (Seseorang Dari Pulau Kita ini Yang Takut Malu) dalam buku *Sibulus-Bulus Sirumbuk-Rumbuk*, kiranya menjadi cermin betapa kita harus malu kepada sesama jika kita tak mau menolong orang lain.

Bagaimana seharusnya kita (orang-orang Mandailing) merespon kehadiran TNBG? *Pertama*, menurut hemat saya, respon yang harus kita berikan tiada lain adalah mendukung sepenuh hati dan kemampuan kita untuk mewujudkannya sehingga memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi kehidupan. Kalau 150 tahun lalu Willem Iskander telah berjuang di bidang pendidikan untuk memberikan pencerahan bagi masyarakatnya, dan ia telah menoreh tinta emas di bidangnya; maka tiba giliran kita untuk menjadi *pejuang penyelamat lingkungan* di tengah-tengah arus derasnya kapitalisasi yang berwujud eksploitasi habis-habisan terhadap kekayaan alam di sekeliling kita bahkan di dunia. Kita masih beruntung karena masih memiliki sedikit lagi sisa hutan alam yang tersisa di Pulau Sumatera, dan karena itu masih punya kesempatan untuk menjaganya baik-baik dan mencegahnya dari kepunahan total sebagaimana yang sudah dialami daerah-daerah lain di Indonesia. Kita masih punya waktu untuk membiarkan anak cucu kita mengenal berbagai jenis burung seperti *kak* (rangkong) yang sudah hampir punah, sebelum semuanya hanya bisa kita saksikan sebagai sebuah produk animasi komputer seperti *dinosaurus*. Tetapi lebih dari itu, kita juga mempunyai peluang untuk menjaga agar sumber-sumber mata air bagi kehidupan kita tidak segera mati, yang apabila ia mati akan sekaligus mematikan peluang hidup bagi anak cucu kita. Sudah barang tentu kita tidak ingin tercatat dalam sejarah sebagai generasi yang

rakus dan menghabiskan segala kekayaan alam yang ada sehingga tak tersisa sama sekali untuk bekal hidup generasi yang akan kita lahirkan; kecuali kita tidak berniat lagi untuk mengembang-biakkan atau meneruskan keturunan kita. Dengan kata lain, kita bertanggung jawab untuk menyisakan dan memberi ruang hidup bagi generasi-generasi mendatang yang akan menempati ruang hidup yang kita tempati dan "kuasai" sekarang.

Kedua, secara substantif, kehadiran TNBG sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru bagi kita. Fungsi dan tujuan konservasi yang melekat dalam TNBG sudah menjadi bagian dari budaya kita di masa yang lalu, bahkan dalam konteks yang terbatas masih dipraktikkan oleh sebahagian dari masyarakat kita hingga sekarang dalam bentuk pengelolaan Lubuk Larangan. Kita mengenal istilah "*rarangan*" untuk menyebut apa yang sekarang sangat populer dengan istilah konservasi. Kita telah lama mengenal istilah "*arangan rarangan*" (hutan larangan), "*lubuk rarangan*" (lubuk larangan) dan lain sebagainya, yang oleh para pendahulu kita telah diatur sedemikian rupa dengan berbagai ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan adat. Ada ketentuan mengenai pemanfaatan kayu, perburuan binatang, pemanfaatan bahan tambang di dalam sungai, dan sebagainya dalam bentuk *bungo ni padang*, *bungo ni hayu*, *bungo pasir*, dll. Semua itu sudah pernah berlaku dan menjadi bagian dari sistem kehidupan masyarakat kita di masa lampau. Oleh karena itu, TNBG hanyalah replikasi atau wujud revitalisasi dari konsep "*rarangan*" yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan Mandailing.

Ketiga, kehadiran TNBG yang akan dikelola secara kolaboratif dengan melibatkan warga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan secara setara dan adil, juga memberi peluang besar bagi kita untuk mengasah dan menguatkan kembali solidaritas sosial yang dalam istilah populer sekarang ini disebut dengan modal sosial (*social capital*). Kemajuan dalam pembangunan dapat dicapai dengan baik tidak hanya sebatas pengelolaan modal material. Kajian-kajian mutakhir memperlihatkan bahwa kelangengan sebuah

program pembangunan hanya dimungkinkan apabila di dalamnya juga diinvestasikan apa yang disebut modal sosial. Modal sosial itu terwujud dalam kemampuan kita untuk membina hubungan saling percaya satu sama lain, kemampuan kita untuk mengembangkan partisipasi yang setara dan adil, dan kemampuan kita merajut pranata atau aturan-aturan main dan menegakkannya secara adil dan konsisten. Komunitas-komunitas desa yang mengelola Lubuk Larangan di daerah Mandailing Natal sejak awal 1980-an, khususnya dalam kasus-kasus desa yang bertahan lama, membuktikan ampuhnya pendayagunaan modal sosial dalam pengelolaan sumberdaya alam milik bersama. Model pengelolaan lubuk larangan oleh desa-desa yang ada di sekitar aliran sungai, terutama aliran Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Natal, yang sudah berlangsung apik sejak 1980-an, menjadi contoh teladan untuk direplikasi dalam pengelolaan sumberdaya lain. Sistem pengelolaan lubuk larangan yang berintikan pendayagunaan modal sosial itu bisa menjadi rujukan bagi kita dalam mengelola TNBG. Kalau pengelolaan lubuk larangan masih bersifat parsial, dan eksklusif dalam suatu desa, maka TNBG memberikan peluang bagi kita untuk mengembangkan sistem pengelolaan berbasis modal sosial dalam lingkup komunitas yang lebih luas, yaitu melibatkan komunitas-komunitas desa di lingkungan taman nasional, yang mencakup kurang lebih 70 desa. Karena pada intinya pengelolaan sumber daya alam berbasis modal sosial seperti yang dipraktikkan melalui Lubuk Larangan adalah implementasi dari kehidupan kemasyarakatan yang madani (*civic community*), maka dengan mewujudkan mozaik kehidupan masyarakat madani dalam konteks pengelolaan TNBG akan sekaligus bermakna sebagai kontribusi kita dalam mewujudkan "Kabupaten Madani yang Madani" sebagaimana yang selama ini dijadikan slogan.

Bagaimana mengurus TNBG ditinjau dari dimensi budaya Mandailing?

Kalau di awal tulisan ini dikutip Willem Iskander yang menjadi guru bagi

orang-orang Mandailing dan Tapanuli pada pertengahan abad ke-19, tiada maksudnya kecuali untuk mengajak kita melakukan refleksi sejauh mana kita sudah lebih maju dari yang digambarkan oleh Willem Iskander di masa ia hidup? Dalam tulisan-tulisannya ia banyak mengajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya kebersamaan dan kasih sayang antar sesama manusia, pentingnya mencintai sang Pencipta Alam Semesta, yang semuanya sesungguhnya selaras dengan nilai-nilai budaya Mandailing dan ajaran Islam, maka pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini adalah: apakah kita masih hidup dengan nilai-nilai budaya Mandailing dan ajaran Islam? Lebih lanjut, apakah nilai-nilai budaya Mandailing dan ke-Islam-an dapat kita revitalisasikan dalam konteks pengelolaan TNBG ke depan?

Menurut hemat saya, jika unsur-unsur ke-Mandailing-an dan ke-Islam-an akan diintegrasikan dalam pengelolaan kolaboratif TNBG, pada tahapan awal masih diperlukan sebuah pra-kondisi sosial budaya yang kondusif untuk tujuan tersebut. Hal itu penting mengingat dalam bilangan tahun atau puluhan tahun harus diakui bahwa nilai-nilai budaya Mandailing telah mengalami pengeroposan, antara lain karena tergerus oleh derasnya budaya kapitalisme yang melanda dunia, tak terkecuali juga telah melindas kehidupan masyarakat Mandailing yang dulu dikenal sangat guyub. Paling sedikit ada tiga aspek budaya yang sangat mendasar dan saling berkaitan satu sama lain yang memerlukan upaya revitalisasi sebelum kita melangkah kepada tindakan-tindakan kolaboratif dalam pengelolaan TNBG.

(1). Revitalisasi nilai budaya HOLONG dan DOMU

Holong artinya kasih sayang; *domu* berarti persatuan. *Holong* merupakan filosofi dasar budaya Mandailing. *Holong* menjadi landasan dasar bagi terciptanya masyarakat hukum adat (Nasution, 2001:75). Kasih sayang sesama manusia atau antar warga masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat dikenal istilah "*holong manjalahi domu, domu manjalahi holong*" (kasih sayang akan menumbuhkan rasa

persatuan, dan persatuan akan menumbuhkan rasa kasih sayang). Kasih sayang dalam konteks budaya Mandailing bukan hanya sebatas antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan makhluk lain dan manusia dengan Sang Pencipta. Dengan *holong* itulah terbangun sistem sosial Dalihan Na Tolu dan segenap relasi-relasi yang melingkupinya; dengan *holong* itu pula lahir aturan-aturan adat bagaimana memperlakukan makhluk-makhluk lain, termasuk hewan dan tumbuhan; dan dengan *holong* itu pula ditata hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya.

Kerusakan alam yang terjadi di daerah Mandailing selama ini, khususnya yang terjadi karena ulah warganya sendiri, adalah wujud hilangnya nilai budaya *holong*. Terjadinya konflik antar kampung karena memperebutkan penguasaan atas sumberdaya alam juga sebagai pertanda memudarnya rasa kasih sayang antar sesama. Perkelahian antar warga yang terjadi karena satu pihak mencegah pihak lain yang merusak lingkungan alam, juga pertanda lunturnya kasih sayang terhadap kekayaan lingkungan alam. Sikap membiarkan terjadinya perusakan terhadap hutan dan sumber daya alam lainnya juga merupakan bentuk hilangnya rasa kasih sayang antar sesama. Dengan hilangnya *holong*, maka tidak terwujud lagi *domu*. Fenomena-fenomena sosial yang dicirikan oleh hilangnya *holong* dan *domu* sudah makin menguat dalam kehidupan kemasyarakatan di daerah Mandailing Natal.

Dalam lingkup paling ekstrem, peristiwa bencana alam bisa sangat efektif untuk menguatkan kembali rasa kasih sayang dan persatuan. Lihatlah betapa orang sedemikian cepat terharu dan mau mengulurkan tangan untuk membantu korban gempa dan tsunami di Aceh, maupun dalam peristiwa-peristiwa bencana lainnya. Tetapi dalam keadaan normal, orang mudah lupa untuk menolong sesamanya. Mengapa kita tidak bergegas mengulurkan tangan untuk sebuah tujuan yang akan menghindari orang tertimpa bencana? Di sinilah diperlukan kembali reorientasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya *holong*. Bagi orang Mandailing upaya

ke arah itu sesungguhnya bisa lebih mudah mengingat mereka sangat dekat dengan ajaran Islam. Orang Mandailing mengenal ungkapan "*ombar do adat dohot ugamo*" (adat dan agama berjalan selaras). Usaha menguatkan kembali nilai-nilai budaya *holong* dan *domu* yang menjadi filosofi dasar budaya Mandailing bisa berjalan selaras dengan menguatkan kembali ajaran agama Islam tentang kasih sayang.

(2). Menghidupkan kembali kata (hi)TA dalam kehidupan sosial.

Hilangnya *holong* dan *domu* dalam ranah kognitif dan spritualitas masyarakat Mandailing berimplikasi pada hilangnya suku-kata TA dalam kamus bahasa mereka. Suku-kata TA yang berasal dari kata *hita* (kita) adalah bentuk posesif yang biasa melekat kepada kata benda lain dan membentuk makna kepemilikan. Misalnya *aman-ta* (ayah kita), *anak-ta* (anak kita), *saban-ta* (sawah kita), *hutan-ta* (kampung kita), dan lain sebagainya. Penggunaan akhiran TA yang bermakna posesif tersebut bukanlah dalam arti kepemilikan yang sesungguhnya (formal), melainkan sebagai bentuk ungkapan rasa kebersamaan. Dengan menggunakan suku-kata TA, seorang penutur mengaktualisasikan empati, simpati, kebersamaan dan solidaritas kepada lawan bicaranya; yang kemudian akan mendapatkan umpan balik yang sama dari si penerima. Karena itu tumbuhlah kebersamaan, dan kebersamaan adalah wujud sosial dari kasih sayang (*holong*).

Semangat kebersamaan itulah yang semakin melemah/memudar dalam kehidupan masyarakat Mandailing, sehingga mereka tidak lagi bisa bersatu dalam menangani suatu permasalahan. Banyak faktor yang menyebabkan rasa kebersamaan itu semakin memudar, diantaranya karena hilangnya hubungan saling percaya (*trust*). Rasa saling percaya hilang biasanya terkait dengan hubungan-hubungan sosial yang tidak dilandasi keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*equity*). Bagaimana kebersamaan bisa tumbuh, misalnya dalam pengelolaan dana pembangunan desa, kalau para pihak

yang mengelolanya tidak transparan, dan tidak memberikan rasa keadilan kepada mereka yang berhak mendapatkannya?

Oleh karena itu, untuk mengembalikan semangat kebersamaan, yang secara verbal bisa terwujud dalam komunikasi interpersonal menggunakan kata HITA (kita) - bukan dominan HAMI (kami), AU (aku) atau HO (kau)—dibutuhkan hubungan yang dilandasi saling percaya, keterbukaan dan keadilan dalam konteks kehidupan yang melibatkan perlunya kebersamaan. Dalam konteks pengelolaan TNBG, tentu saja kita semua yang sudah, sedang dan akan terlibat di dalamnya harus mulai dengan memaknai secara sama TNBG tersebut, yaitu memosisikannya sebagai "milik kita bersama", bukan hanya milik pemerintah, atau milik para inisiator yang mengurusnya, atau hanya milik desa-desa yang berbatasan atau bersinggungan dengan areal TNBG itu. Objek *holong* (kasih sayang) kita adalah TNBG dan segala isinya, serta para pihak yang terkait kepentingan dengan keberadaannya baik orang Mandailing sendiri maupun saudara-saudara kita yang datang ke Mandailing. Prinsip dasarnya adalah keadilan, keterbukaan dan hubungan saling percaya dalam seluruh tahapan pengelolaan, sehingga semua pihak merasa TNBG sebagai milik bersama.

(3). Mewujudkan prinsip partisipasi "RA-RO, RO-RA".

Rasa *holong* dan *domu* serta rasa kebersamaan (*hita*) baru terlihat manifestasinya dalam bentuk tindakan apabila warga kolektif mewujudkan apa yang disebut "RA-RO, RO-RA" (mau-datang, datang-mau). Kalau kita sudah memiliki kemauan (RA) untuk saling menolong sesama, maka kemauan itu baru bermakna apabila kita mewujudkannya dengan benar-benar datang (RO), dalam arti hadir dan memberikan sesuatu yang bisa menolong orang lain. Sebaliknya, apabila kita sudah datang (RO) ke suatu acara atau rencana, maka kehadiran kita baru akan bermakna apabila kita mau (RA) berpartisipasi aktif di dalamnya, bukan sekedar datang menyeter muka (*patarida bohi*).

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan orang-orang dengan penuh semangat mengatakan akan mendukung sesuatu rencana, tetapi ketika kita menagih wujud partisipasi aktifnya (dalam bentuk pikiran, tenaga, atau materi) justru kemudian berusaha mengelak. Rasa kasih sayang dan kebersamaan baru akan terwujud apabila kita menunjukkan kemauan (RA) sekaligus tindakan (RO) yang mencerminkan wujud kebersamaan dan kasih sayang itu. Dalam konteks pengelolaan TNBG, kehadiran kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan membahas strategi dan mekanisme pengelolaannya baru akan berarti apabila kita benar-benar mau berpartisipasi aktif di dalamnya, bukan sekedar hadir. Kehadiran kita haruslah merupakan implementasi dari semangat kebersamaan kita dalam mengelola TNBG, dan semangat kebersamaan yang menghinggapi diri kita haruslah merupakan implementasi dari rasa kasih sayang yang tumbuh dari kesadaran kita yang dalam, bukan karena terpaksa atau sikap pura-pura.

Strategi Pengelolaan Kolaboratif TNBG

Bagaimana mengelola TNBG? Jawabnya bisa beraneka, dan tulisan ini tidak bermaksud mendeskripsikan suatu model yang dianggap paling baik dari yang lain. Hanya saja, menurut hemat saya, pengelolaan yang bersifat kolaboratif adalah sebuah keniscayaan sehingga semua pihak yang memiliki kepentingan dengan TNBG terakomodasikan kepentingannya secara adil dan proporsional. Para inisiator yang menggagas dan menghela gagasan tentang TNBG ini sudah barang tentu sudah memiliki kerangka yang menjadi rujukan pengelolaan ke depan.

Sekedar untuk memperkaya gagasan yang sudah ada dari para inisiator, di sini ingin disampaikan pelajaran yang bisa dipetik dari sistem pengelolaan Lubuk Larangan, sebuah sistem pengelolaan sumberdaya alam milik bersama yang boleh dikatakan sudah ajeg secara sosial budaya, ekonomis dan sampai batas-batas tertentu ajeg secara ekologis. Praktik-praktik pengelolaan Lubuk Larangan ini terdapat di banyak desa di Kecamatan Kotanopan, Muara Sipongi, dan

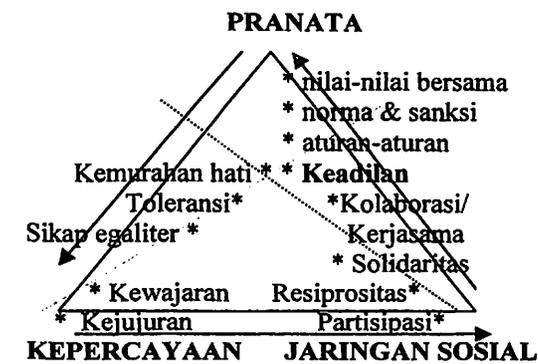
Batang Natal, dan sebagian di antaranya tergolong cukup persisten dan berhasil. Dari penelitian yang pernah dilakukan mengenai pendayagunaan modal sosial dalam sistem pengelolaan Lubuk Larangan di Mandailing (lihat Zulkifli Lubis, 2001), diperoleh kesimpulan bahwa untuk bisa menumbuhkan dan membangun suatu kearifan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti kasus lubuk larangan diperlukan adanya paling sedikit delapan langkah pengelolaan, yaitu :

- (1) Menetapkan sumberdaya yang kongkrit sebagai subjek pengelolaan, yang bersifat aksesibel bagi suatu komunitas.
- (2) Mengembangkan ide atau gagasan untuk pengelolaan sumberdaya tadi melalui proses partisipatif dan kemudian menetapkan sebuah pilihan cara mengatasi masalah
- (3) Menemukan konsensus di antara para pihak (*stakeholder*) untuk mendapatkan komitmen dan dukungan atas pengelolaan sumberdaya
- (4) Merumuskan tujuan pengelolaan, yang mungkin untuk dicapai dan dapat memenuhi kebutuhan bersama warga kolektif
- (5) Menetapkan jaringan/satuan sosial yang menjadi konstituen pengelolaan, yaitu mereka yang akan menjadi partisipan aktif dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hasilnya
- (6) Merajut pranata/institusi, baik berupa sistem nilai bersama, norma-norma dan sanksi-sanksi maupun aturan-aturan yang lebih teknis
- (7) Membangun hubungan saling percaya (*trust relation*), berlandaskan adanya jaminan keadilan bagi semua pihak
- (8) Melakukan siklus pendayagunaan modal sosial dengan membangun kekompakan atau kesatuan (*cohesiveness*) di kalangan jaringan/satuan sosial yang menjadi konstituen, yaitu meneguhkan pelaksanaan institusi, memupuk kepercayaan, dan seterusnya secara berulang/siklikal.

Pengelolaan Lubuk Larangan yang berhasil dan bertahan lama (persisten)

dicirikan oleh kemampuan warga komunitas desa pengelola Lubuk Larangan untuk membangun hubungan saling percaya, mengembangkan pranata/aturan main yang adil, serta membangun jaringan sosial yang kompak; yang kesemuanya memberikan peluang bagi warga komunitas untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan. Siklus pendayagunaan modal sosial itu dapat dilihat dalam skema di bawah ini :

Skema 1. Hubungan antar elemen modal sosial



Berikut ini disajikan kerangka hipotetik hubungan siklikal pendayagunaan modal sosial dalam konteks Pengelolaan Kolaboratif TNBG, sebagai berikut:

- (a) Kepercayaan (*trust*) dalam pengelolaan TNBG akan tumbuh apabila semua elemen sosial yang terlibat di dalamnya memiliki kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, sikap toleran dan kemurahan hati.
- (b) Dengan tumbuhnya kepercayaan di kalangan elemen sosial yang menjadi *stakeholder*, pengelolaan TNBG maka akan mudah pula digerakkan partisipasi, yang dilandasi oleh hubungan yang bersifat timbal balik (resiprositas), dan karena itu akan tumbuh pula solidaritas, dan dengan tumbuhnya solidaritas akan terbangunlah kerjasama (kolaborasi).
- (c) Ketika sebuah kolaborasi mulai terwujud, ia harus dibingkai dengan pranata yang

berisi nilai-nilai bersama berkenaan dengan TNBG, norma-norma, aturan-aturan dan sanksi-sanksi atas pelanggaran norma dan aturan. Dengan penegakan yang konsisten dan berkeadilan terhadap aturan yang disepakati bersama, maka akan semakin menguat pula hubungan saling percaya. Selanjutnya akan semakin kompak pula satuan/jaringan sosial yang menjadi konstituen pengelolaan, dan seterusnya.

Penutup

Masyarakat Mandailing memiliki khasanah kearifan budaya yang bisa didayagunakan dalam rangka pengelolaan kolaboratif TNBG. Filosofi dasar budaya Mandailing adalah *holong* (kasih sayang) dan *domu* (persatuan). Perjalanan waktu dalam menghadapi berbagai problem dan tantangan hidup, memang, membuat nilai-nilai budaya *holong* dan *domu* mulai tergerus dan terkikis sehingga sebagian masyarakat Mandailing mulai gamang untuk mengembangkan kolaborasi dalam mengelola sumberdaya milik bersama. Hubungan saling percaya menipis, dan semangat kebersamaan dan kekompakan berangsur pudar. Beriringan dengan itu, kepatuhan terhadap pranata berupa nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang ada juga cenderung mengendur. Bagaimanakah masa depan pengelolaan TNBG dalam situasi sosial budaya yang demikian ?

Tentu saja optimisme harus selalu dihidupkan. Kita masih mempunyai stok modal sosial yang bisa diinvestasikan ke depan, salah satunya yang masih dengan mudah terlihat dalam praktik pengelolaan Lubuk Larangan yang persisten. Mereka yang mengelola Lubuk Larangan juga tiba pada kemampuan untuk memupuk modal sosial justru dari langkah yang tertatih-tatih, kemampuan mereka bukan sesuatu yang *given*, melainkan diusahakan dengan penuh kesabaran dan kerja keras. Mereka memulai usahanya dengan menghidupkan kembali rasa kasih sayang (*holong*) dan persatuan atau kebersamaan (*domu*), lalu diimplementasikan

dengan wujud partisipasi “ra-ro,ro-ra”. Kemudian dikuatkan dengan bangunan modal sosial yang berintikan kepercayaan, jaringan sosial yang kompak, dan pranata yang kuat, yang kesemuanya itu mewujudkan dalam bentuk pengelolaan yang berkeadilan bagi semua. Semua elemen modal sosial itu merupakan unsur-unsur substantif yang selaras dengan kebudayaan Mandailing maupun ajaran Islam, sehingga tidak akan menghadapi resistensi jika diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Mandailing, termasuk ketika mereka akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan TNBG ke depan.

Apapun bentuk atau kerangka organisasi pengelolaan TNBG yang akan kita buat dan implementasikan, hendaknya mesin organisasi itu selalu harus dilumasi dengan elemen-elemen modal sosial seperti disebutkan di atas. Menurut para ahli, modal material akan dengan mudah habis jika terus digunakan, tetapi sebaliknya modal sosial akan semakin banyak justru ketika ia digunakan terus-menerus. Modal sosial itu ada di dalam diri kita masing-masing, dan akan tumbuh subur apabila kita senantiasa memupuk rasa kasih sayang sesama, rasa kebersamaan, dan kemauan serta tindakan untuk bekerjasama.

Drs. Zulkifli Lubis, MA adalah Ketua Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Cerita Rakyat

Pancuri Tujoh

Nibak saboh masa di Nanggroe Aceh, nakeuh udeep sikawan ureueng. Na tujoh droe, buet di awak nyan cit ceumeucue ngon teumipe. Wab nyan keuh sikawan nyang geuboh nan *Pancuri Tujoh*.

Pancuri tujoh sep that meusyehue. Ban sigom nanggroe dithei awaknyan. Seulaen lisek nyan keuh cukup puh bak jidrop le po tanglong nanggroe nyan. Keu mangat takeunang awak nyan, sidroe cahi di nanggroe nyang geutuleh saboh panton bhah pPancuri Tujoh;
*Pancuri bu mata ateh para
Pancuri eungkot jaroe meusiseik
Pancuri peng jaroe meuraba-raba
Pancuri itek mata lam paya*

Panton nyang that masyehue sampoe'an jameun jinoo. Oh leuh nyan teuma bek lale le, bak siuroe teuka, Pancuri Tujoh lam susah raya. Di awak nyang bingong sabab hana le gampong bak jiceumeucue ngon teumipe. Tan jitupat le ho jijak peulaku buet nyan. Kalueh jici mandum teumapat, mandum rumoh, keude, pih peukan raya. Han sapeu jeut keubuet. Mungken ka kayeim jiceu-meucue ngon teumipe, man saboh nyan ka jithe buet *Pancuri Tujoh*. Mandum ureung meuingat-ingat sabee.

Karab *Pancuri Tujoh* nyan putoh asa, untong lam kawan nyang na sidroe ulekawan nyang panyang akai. Hana rugoe jeut keu pang ulee sinan. Ulekawan *Pancuri Tujoh*, meunan narit rakan-rakan jih, saweub leupah le akai, nyoe taplah pruet jih, cit akai seumuleit nyang na lam asoe pruet jih. Meunan keuh ulekawan *Pancuri Tujoh* dipujoe-pujoe aneuk buah jih.

“Pue na suna gata kali nyoe, Pang?” tanyong pancuri meusiseik jaroe. “Neumarilah. Tan ek le tasaba, kagatai jaroe nyoe siuroe hana taceumeucue, Pang,” sambong pancuri panyang ouk.

“Ligat, Pang!” sambong meusigoe pancuri-pancurok laen. “Teunang awak kah,” kheun ulekawan nyang sira jikheim.

Leupah nyan ji-im siat jiseumikee. Na siat, “keunoe mandum, mandum! Lon kana saboh pakat nyang jroh.”

Tan suwah hila le, sigo s'ap ka meuramin man nam *Pancuri Tujoh* bineh ulekawan awaknyan. Man nam *Pancuri Tujoh* jisimak narit ule kawan. Sang meunyoek takalon dari ateh, *Pancuri Tujoh* nyan cit lagee aneuk miet meuen guli. Duek tinggong di meuyueb bak bringen tuha reului. Na dua pakat nyang nyang jipeugah le ulekawan *Pancuri Tujoh*. Nyang phon, awak nyan wajib jipeutroh haba peusuna lam mukim-mukim ateh gunung, beujikira le ureueng mandum nyan narit asai dari po tanglong nanggroe, bahwa mandum ureueng gampong geutham peulara kameng, manok, leumo atawa keubeu. Sabab mandum binatang nyan meupeunyaket nyang goh na ubat peupuleh. Nyoe han dipateih, po tanglong nanggroe akan geupinah atawa geupoh mandum binatang nyan. Teuma di ureueng gampong nyan peuturot haba suna nyoe akan sigra jipubloe mamandum binatang nyan.

“Boh ka, peu teuma untong keu tanyoe, Pang?” seut pancuri singet idong jikoh narit ulekawan *Pancuri Tujoh*.

Pancuri nyang laen pih kateu-peungaroh haba nyan, “ka nyoe meunan, si meusiseik beutoi. Pakri nyang beutoi jih pakat gata e Pang,” seut pancuri laen nyang ruman tari rupa lagee putroe raja.

“Ka im dile awak kah mandum! Goh abeh kupeugah pakat lon,” ulekawan *Pancuri Tujoh* beungeih sabab jikoh haba le aneuk buah jih.

Teuim teuma nam pancuri lage lintah keunong ie bakong. Pakat keudua, leuh haba suna nyang troh, di ureueng gampong pih teupeungaroh. Meujitron teuk awaknyan u peukan Kutaraja. Kutaraja, pusat keurajeun Nanggroe Aceh, jioh di meuyueb gunung sideh. Lhee uroe lhee malam baroe teuka keudeih. Ta peuduek *Pancuri Tujoh* bak tujoh pat, dari gampong nyan sampoe u Kutaraja. Di ureueng gampong nyang po

Cerita Rakyat

binatang nyan pasti jijak rot tujuh pat nyan. Bak tiep-tiep teupat nyan keuh geutanyoe peulaku awak nyan, rakan-rakan mandum.

"Jadi pue keuh makeusud gata, Pang? Neu yue kamoe meulanun?" tanyong pancuri kon lanun.

"Kadeungoe lon dile bangai!" seot ulekawan ka beungeih lom sabab jikoh haba jih. "Jadi tiep-tiep anggota tanyoe nyang na bak teupat maseng-maseng pura-pura jeut keu ureueng mugee, nak bloe binatang nyan. Meuseu meunoe, nyang jiba leumo, tapeugah nyan kameng, nyoe jiba kameng takhuen nyan manok. Meunan sabee takheun sampoe teupat keupeuet. Mungkeng awak ba binatang nyan han jianggok dilee. Tapi lon yakin sampoe teupat keulimong ureueng nyan akan jipateih pu nyang tapeugah dan ureueng bangai nyang akan jipubloe leumo deungon yum kameng, kiban?"

"Hahaha, kamuphom lon jinoo, Pang. Muphom... Gata geut that carong lagoe." "Kah nguuet! Ureueng pungoe pih muphom nyoe ka kupeutrang dari ujung sampoe uram!"

Oh leuh mandum pakat disuson beujroh, meugraklah *Pancuri Tujoh*. Lage hasee duek pakat, *Pancuri Tujoh* pih jipeutroh haba suna nyan bahwa po tanglong nanggroe geulakee mandum binatang publoe peukan sabab saboh peunyakot akan teuka wab binatang nyan. Nyoe tan jipateih narit raja nyan, mandum binatang akan sigra geupeupunah le teuntra keurajeuen. Lagee talake, saweub haba suna nyan, mandum ureueng greh-groh tan teunang. Ka keunong tipee le *Pancuri Tujoh*. Leuh nyan teuma, meukemah teuk ureueng ban saboh gampong tron gunung jak publoe binatang u peukan raya Kutaraja.

Teuma rouh cit lam kawan nyan Apa Kaoy, sidroe peurabe leumo. Awai jih na saboh leumo. Sabab jeumot jirabe, leumo pih meutamah jeut limong boh ka jinoo. Apa Kaoy ureueng seumateih, hana meunoe-meudeih. Jipeuturot laju haba suna nyan, diyue jak publoe leumo jih u Kutaraja. Nibak dipoh matee, goed ta publoe mandum leumoe, pike Apa Kaoy. Sabab Apa Kaoy tinggai agak u ateh gunung, bak binch rouh

rab gampong bak gaki gunong keudeih u Kutaraja, jih keuh ureueng phon that nyang meurumpok ngen *Pancuri Tujoh*.

Dari jioh kon, kaleumah Apa Kaoy teungoh meuhila leumo meukarat-karat u Kutaraja. Troh jih bak teupat pancuri phon. Sinan kajipreh le salah sidroe *Pancuri Tujoh*. "Hai, Abu Chik, ho neukeunak ba kameng-kameng nyan? Pue neunak publoe nyoe?" tanyong pancuri nyan. Pura-pura dikheun leumo Apa Kaoy seubagoe kameng.

Apa Kaoy teukhem raya ban jideungoe narit si Pancuri. "Hai nyoe kon kameng, nyoe leumo, jawai! Beutoi kunak publoe," jaweub Apa Kaoy.

"Hom peu neupeugah. Padum yum binatang nyang neupeugah leumo nyoe?" tanyong pancuri.

"Mandum peut juta, hana kureueng le!" seot Apa Kaoy.

"Peuet Juta? Yum binatang ubeek kameng nyoe? Peuet reutoh ribee beuh?"

"Hai bangai, nyoe kon kameng! Abeh watee kupeugah haba ngon kah," meusangak taheu Apa Kaoy sabab pancuri nyan teutap jipeugah leumo jih nyan kameng.

Ditarek taloe leumo, laju jibeurangkat teuma Apa Kaoy. Bak jalan jiseumike pakon leumo jih dipeugah kameng. Meugo-go jinging u likot bak leumo jih. Treb lheuh nyan nyan teuka teuk Apa Kaoy bak teupat pancuri keudua.

Langsong jikheun le pancuri, "Pijuet-pijuet that kameng nyan lagoe, ho keunak ba?"

Taheu ganteu Apa Kaoy. Ka dua droe nyang peugah leumo jih nyan kameng.

"Kunak publoe," seot Apa Kaoy.

"Padit yum?" tanyong pancuri.

"Jok peuet juta mantong," jaweub Apa Kaoy.

"Panena yum kameng peuet juta, dua reutoh ribee keumah?" tanyong pancuri.

"Han jeuet!" sha'hob Apa Kaoy.

Laju jijak teuma Apa Kaoy. Ka mulei bingong sabab ka dua droe nyang peugah leumo jih nyan kameng. Ureueng phon jilakee bloe peuet reutoh ribee, nyang keudua murah lom. Ban sipanyang taloe rouh jikalon leumo nyan. Tan seupot lom mata lon kheuen

Cerita Rakyat

Kameng lom....kameng lom....pike Apa Kaoy lam hate. Jinging lom ateh leumo-leumo nyan.

"Kunak publoe u Kutaraja," jaweub Apa Kaoy.

"Neupubloe keu lon mantong. Hana payah jak jioh le u Kutaraja. Padit neupeuyum?"

"Dua juta mandum!"

"Nyan kabala, kakon buet, nyan yum unta Polem! Nyoe pih lom kameng kon leumo! Kakeuh neuba laju u peukan, soe teupeue meurumpok raja dan diblo kameng nyan deungon yum unta," kheun pancuri ceudah rupa sira diboh muka u laot. Meuasek-asek ule Apa Kaoy jitinggai pancuri nyan sidroe.

Rupajih Apa Kaoy han leupah jak liwat gunung nyan sigoh matauroe lob. Pih jinoo ka jiputa arah jiriwang teuma u rumoh, gadoh niet publo leumo u Kutaraja. Leupah meurumpok teuma ngon pancuri seudang bunoe, bak jalan weit dikeu nyan meuteumei lom ngon pancuri mata juleng. Jipeugah lom leumo-leumo nyan seubagoe kameng jilakee bloe ngon yum leubeh murah lom dari yum bak pancuri ceudah bunoe. Aleh wab hek that, duek meuputi preuy atawa akhee jih Apa Kaoy Apa Kaoy pih jipateih bahwa leumo jih nyan kameng mandum, meujipeugala teuk mandum leumo nyan keu pancuri mata juleng nyan. Meunan cit di ureueng gampong nyang laen, tan troh-troh u Kutaraja. Lalei ngon taki-tipe *Pancuri Tujoh* deungon yum cukup that-that murah. [ehz]

Apa Kaoy lam hate. Treb leuh nyan troh Apa Kaoy bak teupat pancuri keulhee.

"Ho nak ba kameng nyoe? Pakon pijuet-pijuet that? Hana neuhireu lagoe," sapa pancuri keulhee.

"Kunak publoe! Hai sabee na kuhireu leumo nyoe. Kon kameng nyoe leumo....leumo!"

"Bohka jeut, padum yum?"

"Peuet juta!" seot Apa Kaoy.

"Peuet juta? Adak u Arab pih han lagot hai Apa! Ka keuh neuba laju keudeih, soe teupeu na ureueng bangai nyang bloe," jaweub pancuri keu lhee sira jikheim teukheh-kheh.

Lam bingong tamah peuneng, Apa Kaoy tarek taloe nyang dipeugah kameng bunoe, jibeurangkat teuma u peukan. Meutamah sangsi jih, bak jalan u Kutaraja jinging lom leumo nyan. Dari iku, geulinyueng, takue sampoe ulee leumo nyan. Nyoe beutoi leumo, tan na salah. Atawa meuhai that kupubloe? Kajeuet nyoe meunan kupeutron jeuet dua juta, soe na nyang lakee eunteuk, pikee Apa Kaoy.

Leupah uteuen bayeu, meuteume rauh cot u gunung. Mantong treb Apa Kaoy troh u peukan raya. Suwah teungoh dua boh gunung teuk baroe leumah Kutaraja. Jikeumira kiban beutroh blah deih dua gunung nyan sigolom dilob matauroe, beujeuet piyoh hek siat simalam lagee nyan teuka di gaki gunung nyang blah wie jalan na pasi ceudah rupa.

Bak jalan meuweit ateh cot gunung nyan meurumpok lom ngon pancuri keupeuet. Jiduek ateh bate rayeuk sira jipiep rukok, mata u laot. Jisapa Apa Kaoy le pancuri seudang nyan, "ho neukeunak ba kameng pijuet-pijuet nyan, Polem?" tanyong pancuri nyan.



Dari
**BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN
 NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH**

Sejarah Seni Rupa Sumatera Utara Kajian Kehidupan Seni Rupa Di Medan Tahun 1945-2005 (Sebuah Observasi Historis), Drs. Amran Ekoprawoto.,dkk.,102 , 2007

Buku ini menceritakan tentang pertumbuhan dan perkembangan Sejarah Seni Rupa di Sumatera Utara. Berbicara tentang Seni Rupa tidak lepas kaitannya dengan Seni Lukis. Perjalanan Seni Lukis di Sumatera Utara berawal dengan berdirinya Angkatan Seni Rupa Indonesia (ASRI- 45). Ikatan ini memiliki peranan ganda dalam perkembangannya, pada satu sisi berperan untuk meningkatkan mutu karya seni lukis dan wadah para pelukis. Pada sisi lain adalah peran serta pelukis dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia melalui aktivitas berkesenian serta membuat poster-poster perjuangan untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Dalam kiprahnya ASRI- 45, sebagai organisasi kesenirupaan tidak pernah goyah terhadap pergolakan politik yang menyeret lembaga seni tunduk dan patuh pada satu partai politik yang berkuasa pada saat itu, sebab keterlibatan politik dalam seni sangat berpengaruh. Adapun pengaruh dari partai politik tersebut dapat mempengaruhi kreativitas para pelukis dan seniman, sehingga memberi dampak negatif yang menjadi belenggu terhadap kebebasan proses kerja penciptaan karya seni.

Di samping itu, buku ini juga menyinggung periode tahun 1980-an. Periode ini menjadi era kebangkitan dinamisasi kehidupan seni di Sumatera Utara. Aktivitas dalam menghidupkan Seni lukis, diselenggarakan melalui pameran bersama yang menampilkan ; Seni Lukis, Seni Eksperimental, Seni Instalasi, Festival Seni Medan dan aktivitas Diskusi Seni. Upaya dan langkah ini hendaknya didukung dengan infrastruktur dan sufrastruktur untuk membangun semangat dalam mengembang tumbuhkan kehidupan seni lukis didaerah ini. Peran serta masyarakat, para kolektor, pecinta seni, lembaga budaya, instansi terkait, media massa, sentral seni dan galeri sangat dituntut untuk kemajuan seni di Sumatera Utara. Sehingga keberadaan lembaga budaya, sentral seni dan galeri seni menjadi jembatan pemicu kreativitas para pelukis senirupawan, dan bagi masyarakat menjadi sarana peningkatan apresiasi seni, dengan menyenangi, mencintai karya seni sehingga Medan ramah dengan kehidupan seni. (CZ)

